

Skripsi

EKSISTENSI NILAI LOKAL DALAM INOVASI PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus: *Program Brigade Siaga Bencana di Kabupaten Bantaeng*)

Disusun dan Diusulkan Oleh

AHMAD NITOZI MANSUR

Nomor Stambuk : 10564 01964 14



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : Eksistensi Nilai Nilai Lokal Dalam Inovasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Program Brigade Siaga Bencana di Kabupaten Bantaeng)

Nama Mahasiswa : Ahmad Nitozi Mansur

Nomor Stambuk : 105640196414

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

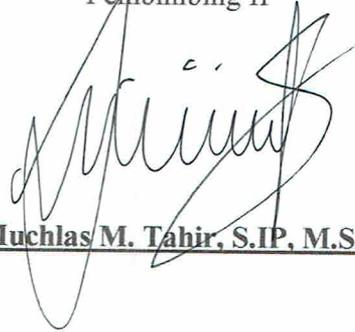
Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Amir Muhiddin, M.Si

Pembimbing II

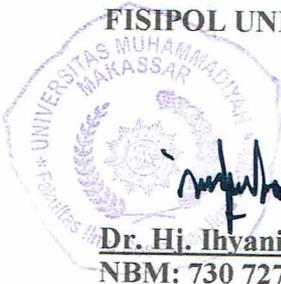


Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si

Mengetahui:

Dekan

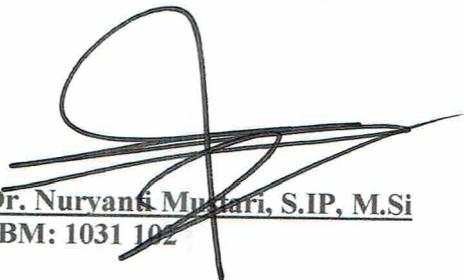
FISIPOL UNISMUH Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.sos., M.S.i
NBM: 730 727

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Muchari, S.IP, M.Si
NBM: 1031 102

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0006/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis Tanggal 07 Februari Tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



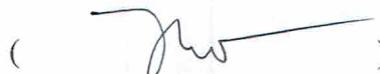
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

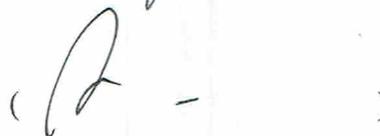
1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si



2. Dr. Amir Muhiddin, M.Si



3. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd



4. Muchlas M. Tahir, S.IP., M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ahmad Nitozi Mansur

Nomor Stambuk : 105640196414

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 17 Juli 2018

Yang Menyatakan

Ahmad Nitozi Mansur

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Rabb semesta alam, pemilik langit, bumi dan segala yang ada diantara keduanya. Atas segala limpahan nikmat, kasih sayang hidayah dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Eksistensi Nilai Lokal dalam Inovasi Pemerintah Daerah Studi Kasus: Program Brigade Siaga Bencana (BSB) di Kabupaten Bantaeng”**. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Sang Murabbi bagi seluruh umat manusia. Beliau adalah guru dan teladan yang terbaik bagi umat manusia bukan hanya dalam ibadah juga mendidik generasi-generasi penerusnya sehingga menghasilkan generasi terbaik yaitu para sahabatnya, *bai'in* dan *tabi'ut*, keselamatan bagi mereka semua serta orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda Mansur Tjongkeng dan ibunda St. Hasnah yang telah mendukung dan merespon penuh dan telah mencurahkan seluruh kasih sayang dan pengorbanan yang diberikan selama ini hingga saya ke jenjang pendidikan S1, semoga segala

pengorbanan beliau memperoleh ridho dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

2. Bapak Dr. Amir Muhidin, M.Si, selaku pembimbing I dan Bapak Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan dan sebagai Dosen Penasehat Akademik saya yang selama ini memberikan motivasi terkait persoalan kuliah, administrasi kelengkapan berkas, dan mendorong untuk selalu mengutamakan persoalan akademik ketimbang hal yang lain.
5. Bapak serta Ibu dosen beserta staf FISIPOL Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu selama menempuh pendidikan sampai tahap penyelesaian studi.
6. Para pihak Dinas/ instansi yang ada pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kepada seluruh keluarga besar FISIPOL Universitas Muhammadiyah Makassar terutama angkatan AFILIASI 014, terima kasih atas waktu dan kebersamaan yang dilalui selama masa perkuliahan.

8. Kepada seluruh kakanda dan para sahabat PMII terimakasih telah memberi ruang untuk belajar dan berkembang di dalam organisasi pergerakan
9. Kepada seluruh teman teman di komunitas Celebes X Society yang telah mewadahi saya dalam mengembangkan bakat dan selalu mendukung dan member semangat selama dalam proses penyelesaian skripsi.
10. Kepada sahabat terkhusus Irma Putri Suriadi, dan seluruh Almoz Crew dan StandUp Indo Bantaeng yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu terimakasih selalu member semangat dan arahan agar selalu memprioritaskan akademik
11. Seluruh rekan-rekan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, namun telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.

Dengan segala keterbatasan, dan demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan hal yang baik.

Makassar, 4 November 2018

Penulis

AHMAD NITOZI MANSUR

ABSTRAK

AHMAD NITOZI MANSUR. Eksistensi Nilai Lokal dalam Inovasi Pemerintah Daerah Studi Kasus pada Program Brigade Siaga Bencana (BSB) di Kabupaten Bantaeng (dibimbing oleh Amir Muhidin dan M. Tahir)

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang inovasi pemerintah daerah dalam program Brigade Siaga Bencana serta mengetahui eksistensi nilai lokal pada inovasi pemerintah dalam program BSB tersebut. Informan dalam penelitian ini ialah Kasubag Inovasi dan Pengembangan Bappeda, Kabag Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dokter yang ditugaskan oleh Dinas Kesehatan pada program BSB, Pemangku adat, serta masyarakat yang pernah merasakan manfaat dari program BSB tersebut. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi langsung, kajian pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengindikasikan: (1) Bahwa layanan terintegrasi program inovasi Brigade Siaga Bencana di Kabupaten Bantaeng menyetarakan pelayanan kesehatan antara yang tinggal di perkotaan dan di pelosok Desa, (2) Desentralisasi (3) Pemanfaatan kerjasama yang melibatkan tiga instansi pemerintah serta pihak asing, (4) Pelibatan anggota masyarakat, dan (5) Pemanfaatan Teknologi komunikasi dan informasi. Kemudian, eksistensi nilai-nilai lokal pada inovasi pemerintah daerah dalam program inovasi Brigade Siaga Bencana di Kabupaten Bantaeng terlaksana berdasarkan nilai yang ditemukan, yaitu: (1) Nilai Kejujuran, (2) Nilai Kepatutan, (3) Nilai Cendekia dan (4) Nilai Keteguhan..

Kata Kunci : Inovasi, Nilai Lokal, Program Brigade Siaga Bencana

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	viii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Nilai Nilai Lokal	5
1. Pengertian Nilai Nilai Lokal.....	5
2. Sistem dan Bentuk Bentuk Nilai Lokal.....	5
3. Nilai Kebudayaan Lokal Berdasarkan Wujudnya.....	10
4. Nilai-Nilai Lokal Sulawesi Selatan.....	12
B. Inovasi.....	18
1. Pengertian Inovasi	18
2. Inovasi Dalam Pemerintahan	21
C. Kerangka Pikir.....	22
D. Fokus Penelitian.....	23
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	27
D. Informan Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Pengabsahan Data.....	29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	30
B. Program Inovasi Brigade Siaga Bencana (BSB) Kabupaten Bantaeng.....	40
C. Eksistensi Nilai Lokal dalam Inovasi BSB Kabupaten Bantaeng.....	46
D. Pembahasan.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modernisasi saat ini ternyata menimbulkan dilema tersendiri bagi pemerintah. Dilematisasi itu sendiri terlihat bahwa disatu sisi pemerintah tidak bisa hidup selalu dalam keadaan tradisional dan stagnan atau yang disebut dengan serba manual. Akan tetapi disisi lain, ternyata modernisasi dari teknologi menimbulkan dampak dan pengaruh yang luar biasa yakni akan tergerusnya nilai-nilai budaya yang merupakan ciri khas dari suatu bangsa (Ruslan:2015).

Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur Pemerintahan daerah sendiri . Hal ini memicu munculnya inovasi di beberapa daerah. Pemerintah pusat mengadakan kompetisi dalam hal inovasi daerah yang diberi nama "*Innovative Government Awards (IGA)*". Dengan demikian kompetisi yang diadakan oleh KEMENDAGRI ini akan semakin memacu dan menjadi support eksternal dari pemerintah daerah dalam berinovasi agar dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya sehingga menambah daya saing bagi daerah tersebut. (Rahmawati, dkk, 2014).

Inovasi sendiri telah ada landasan hukumnya dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bertajuk Inovasi Daerah. Dari Pasal 386 hingga pasal 390 UU 23/2014. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk pembaharuan antara lain penerapan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan

temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Begitu pun dengan pelestarian dan pemajuan kebudayaan berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan pasal 1, yaitu pemerintah daerah dengan kewenangannya sebagai pemimpin melaksanakan otonomi daerah untuk mengidentifikasi, mendata, menjaga, memberdayakan, dan mempublikasikan kearifan lokal atau nilai nilai lokal untuk mengetahui dan menjaga eksistensinya.

Moendardjito (dalam Hendar, 2012) mengatakan kearifan lokal adalah kecerdasan yang bersifat lokalitas yaitu mampu bertahan dari pengaruh budaya luar. Artinya pergesekan budaya yang masuk dari luar disebabkan oleh salah satu dampak globalisasi mampu teranulir sehingga efek yang disebabkan budaya luar tidak menggeser posisi lokalitas itu sendiri didukung oleh kesadaran masyarakat terhadap pentingnya identitas suatu daerah (*local genius*). Tak hanya itu, transformasi nilai budaya juga harus dilakukan agar nilai nilai budaya mampu beradaptasi dengan konteks kekinian saat ini dan tidak ketinggalan zaman (Yunus dalam M. Tahir, 2017)

Menurut Putra (2014), dalam penelitiannya yang berjudul “Demokrasi To-Manurung Falsafah Politik Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan”. Berkenaan dengan nilai politik Tomanurung, nilai-nilai budaya di sini dimaknai sebagai pandangan, pendapat atau keyakinan yang menjadi alat untuk menentukan baik-buruknya, benar-tidaknya siasat, aktivitas, sistem, dan struktur yang menyangkut kehidupan orang banyak. Disisi lain, dua tahun setelahnya Nurhaq (2016) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Inovasi Layanan

Kesehatan Bebas Retribusi di Kabupaten Bantaeng”. Hasil penelitiannya BSB (Brigade Siaga Bencana) merupakan sebuah layanan kesehatan dengan sistem mobile dan sistem jemput bola pasien dengan menghubungi call center 113 atau telepon (0413-21408) beroperasi selama 24 jam secara gratis. Secara umum faktor yang mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaannya ialah unsur masukan meliputi tenaga medis, dana dan sarana yang tersedia sesuai kebutuhan, lalu unsur lingkungan meliputi kebijakan, organisasi dan manajemen, dan unsur proses meliputi tindakan medis dan tindakan non medis sesuai standar profesi yang telah ditetapkan

Perbedaan dengan apa yang peneliti ingin teliti adalah melihat lebih jauh dibalik inovasi yang berkembang pesat terkait inovasi program BSB, ada tidaknya transformasi nilai budaya dalam program tersebut atau malah tergerusnya bahkan menghilangnya nilai budaya akibat adanya inovasi itu sendiri. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Eksistensi Nilai-Nilai Lokal dalam Inovasi Pemerintah Daerah Studi Kasus : Program Brigade Siaga Bencana (BSB) di Kabupaten Bantaeng”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran inovasi pemerintah dalam program BSB di Kabupaten Bantaeng?
2. Bagaimana eksistensi nilai nilai lokal pada inovasi pemerintah daerah dalam program BSB di Kabupaten Bantaeng?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran inovasi pemerintah dalam program BSB di Kabupaten Bantaeng
2. Untuk mengetahui eksistensi nilai-nilai lokal dalam inovasi program BSB di Kabupaten Bantaeng

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik
 - a. Sebagai tambahan literatur atau bahan dalam kajian Ilmu Pemerintahan
 - b. Sebagai informasi ilmiah bagi peneliti yang ingin mengetahui model-model inovasi dan eksistensi nilai-nilai lokalitas dalam inovasi pemerintah daerah di Kabupaten Bantaeng
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan eksistensi nilai-nilai lokalitas daerah di Bantaeng.
 - b. Input bagi para pengambil kebijakan di Bantaeng, Sulawesi Selatan pada periode berikutnya agar menjalankan amanah konstitusi dalam meningkatkan eksistensi nilai-nilai lokalitas di Bantaeng
 - c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi pemerintah daerah maupun lembaga yang terkait lain dalam merumuskan strategi dalam rangka meningkatkan eksistensi nilai-nilai lokalitas di Kabupaten Bantaeng.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Nilai Nilai Lokal

1. Pengertian Nilai Nilai Lokal

Menurut Rosidi dalam Widiyanti (2015:161) Istilah kearifan lokal adalah terjemahan dari “*local genius*” yang pertama kali diperkenalkan Quaritch Wales tahun 1948-1949 yang mengandung arti “kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kebudayaan itu berhubungan”

Local wisdom atau *local culture* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti budaya lokal atau kearifan lokal. Pemahaman budaya lokal budaya menurut para ahli adalah sebagai berikut: Koentjaraningrat (dalam Ardiyanto, 2016:21) memandang budaya lokal terkait dengan istilah suku bangsa, dimana menurutnya, suku bangsa sendiri adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan “kesatuan kebudayaan”. Dalam hal ini, unsur bahasa adalah ciri khasnya.

2. Sistem dan Bentuk Bentuk Nilai Lokal

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan dalam masyarakat lokal dan karena kemampuannya untuk bertahan dan menjadi pedoman hidup masyarakatnya. Di dalam kearifan lokal tercakup berbagai mekanisme dan cara untuk bersikap, berperilaku, dan

bertindak yang dituangkan dalam tatananan sosial. (Ife dalam Unayah dan Sabarisman, 2016:6).

Pemerintah bersama masyarakat perlu memperhatikan hak dan partisipasinya sebagai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya termasuk permasalahan yang multidimensional dan pemberdayaan bagi masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2017 Kebudayaan Tentang Pemajuan Kebudayaan pasal 1, yaitu:

- a. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
- b. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan basil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
- c. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
- d. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
- e. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.

- f. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
- g. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
- h. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
- i. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
- j. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
- k. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.
- l. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.

- m. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- n. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/ atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
- o. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- p. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- q. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan. bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. .

Moendardjito dalam Hendar (2012:57) mengatakan pengetahuan masyarakat lokal memiliki keunggulan yang telah teruji ketangguhannya secara lokalitas, sehingga dipelihara dan dipertahankan oleh komunitasnya. Unsur-unsur budaya dalam kebudayaan daerah yang telah teruji

kemampuannya untuk bertahan sampai masa kini adalah *local genius*. kearifan lokal adalah kecerdasan yang bersifat lokalitas dengan ciri-ciri:

- a. Mampu bertahan terhadap budaya luar
- b. Memiliki kemampuan mengakomodir unsur-unsur budaya luar
- c. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli
- d. Mempunyai kemampuan mengendalikan
- e. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya

Pada masa globalisasi, proses difusi inovasi tidak lagi terkendala ruang dan waktu melainkan terseleksi oleh nilai dan norma yang dianut masyarakat. Identitas budaya (*cultural identity*) merupakan karakteristik masyarakat yang menunjukkan jati dirinya dengan nilai-nilai kearifan lokal. Unsur-unsur inovasi tidak diterima secara utuh, melainkan diterima melalui suatu proses seleksi sesuai dengan kemampuan, kepribadian, dan kebenaran normatif masyarakat setempat. Terdapat keberagaman bentuk kearifan lokal dalam masyarakat, yakni dapat berupa: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus, yang memiliki fungsi konservasi dan pelestarian sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan, bermakna social, bermakna etika dan moral, dan bermakna politik (Sirtha dalam Hayati, 2012:37).

Nilai lokal tidak terlepas dari yang namanya kebudayaan, menurut Alus (2016:3) ada dua nilai kebudayaan, yaitu:

1. Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret, termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi: mangkuk tanah liat, perhiasan, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang, seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, dan mesin cuci.
2. Kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional.

3. Nilai Kebudayaan Lokal Berdasarkan Wujudnya

Menurut J.J. Hoenigman (dalam Saebani, 2012:166) wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Gagasan (Wujud ideal)

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh.

- b. Aktivitas (tindakan)

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak,

serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan.

c. Artefak (karya)

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara ketiga wujud kebudayaan.

Tidak hanya wujud semata, nilai budaya lokal harus mampu untuk bertahan sebagai suatu proses perwujudan kesadaran kolektif yang tersusun dalam masyarakat untuk meneguhkan, menyerap, dan mengubahsuaikan berbagai pengaruh dari budaya lain melalui proses belajar kebudayaan, yaitu enkulturasi, sosialisasi, dan internalisasi yang disandarkan pada pengalaman sejarah yang sama (Kartawinata dalam Ismadi 2014:2)

Yunus dalam M. Tahir (2017:90) memaparkan transformasi nilai adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk tetap melestarikan atau mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya agar budaya tersebut dapat menjawab kompleksitas permasalahan yang dialami oleh masyarakat dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya agar dapat menjadi perilaku atau karakter anak atau masyarakat maka langkah yang harus ditempuh adalah mentransformasi nilai-nilai budaya sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang diperlukan masyarakat dalam konteks kekinian agar budaya tidak ketinggalan oleh perkembangan zaman.

4. Nilai-Nilai Lokal Sulawesi Selatan

Kearifan lokal adalah pengetahuan atau nilai-nilai, prinsip, saran atau pemikiran yang melestarikan pandangan dunia intelijen sebagai dasar etika dan penilaian moral. Seperti yang dirumuskan oleh Mattulada (dalam Idris, 2015:421) sebagai alasan Latoa dan juga ditulis dalam bahasa Lontara bahwa pola pemikiran orang Bugis-Makassar dalam kehidupan sosial dan budaya, dapat disimpulkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Orang yang selalu melihat diri mereka sendiri. Peringkat sosial yang sama di hadapan Tuhan Maha Kuasa
- b. Orang yang selalu melihat tujuannya selalu baik,
- c. Orang yang terus-menerus membangun nilai dan lembaga budaya dan sosial menciptakan keselarasan antara kepentingan kolektif dengan kepentingan individu.

Dengan asumsi tiga pola sikap yang mendasari pemikiran mereka yang pertama, untuk membentuk perwujudan dari nilai-nilai dan norma-norma sosial-budaya, yang disebut panngaderreng. Lebih lanjut, pemikiran diperkuat oleh Rahim (dalam Idrus, 2015:241) menjelaskan bahwa menurut Toriolo, yang menentukan manusia, berfungsi dan keterlibatan sifat manusia, sehingga manusia menjadi manusia (nilai budaya Bugis-Makassar). Nilai budaya disebut sebagai nilai inti yang harus melakukan perannya dalam kegiatan, keduanya di antaranya individu dan lembaga kemasyarakatan adalah:

1. Lempu' = Jujur (Honesty, Credibility) dalam bahasa Indonesia artinya jujur, sama dengan lurus sebagai lawan dari bengkok.

Dalam berbagai konteks kata ini berarti ikhlas, benar, baik atau adil. Sehingga lawan katanya adalah culas, curang, dusta, khianat, seleweng, buruk, tipu, aniaya, dan semacamnya. Arti ini dapat dipahami ketika ditemukan kata lempu' dalam ungkapan-ungkapan Bugis atau Lontara. Berbagai cara pula lontara menerangkan kejujuran itu. Ketika Tociung, cendekiawan Luwu, diminta nasihatnya oleh calon raja (Datu) Soppeng, La Manussa' Toakkarangeng, beliau menyatakan ada empat perbuatan jujur, yaitu (a) memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya; (b) dipercaya lalu tak curang, artinya disandari lalu tak berdusta; (c) tak menyerakahi yang bukan haknya; (d) dan tidak memandang kebaikan kalau hanya buat dirinya, baginya baru dinamakan kebaikan jika dinikmati bersama

2. Asitinajang = Kepatutan (Proper) dalam bahasa Indonesia artinya Kepatutan, kepantasan, kelayakan, kata ini berasal dari tinaja yang berarti cocok, sesuai, pantas atau patut. Lontara mengatakan : "Duduki kedudukanmu, tempati tempatmu. Ade' wari' (adat pembedaan) pada hakikatnya mengatur agar segala sesuatu berada pada tempatnya. Mengambil sesuatu dari tempatnya dan meletakkan sesuatu pada tempatnya, termasuk perbuatan mappasitinaja. Nilai kepatutan ini erat hubungannya dengan nilai kemampuan (makamaka) jasmaniah dan ruhaniah. Penyerahan atau penerimaan sesuatu, apakah itu amanat atau tugas, haruslah

didasarkan atas kepatutan dan kemampuan. Makamaka lebih banyak menekankan penampilan bagi pemangku tanggung jawab.

3. Reso Acca = Kepandaian (Proficiency, Intellectual) Acca : dalam bahasa Indonesia berarti kepandaian atau kepintaran dapat dipahami, baik dalam arti positif maupun negatif. Padahal acca bukan pandai atau pintar tetapi cendekia atau intelek, (cendekia dari Sangsekerta, kearifan dari bahasa Arab). Lontara juga menggunakan kata nawa-nawa yang berarti sama dengan acca. Jadi orang mempunyai nilai acca atau nawanawa oleh lontara disebut Toacca, Tokenawanawa atau Pannawanawa, yang dapat diterjemahkan menjadi cendekiawan, intelektual, ahli pikir atau ahli hikmah arif. Pengertian ini masih perlu dijelaskan guna membantu kita memahami nilai kecendekiaan yang dikemukakan oleh lontara. Tociung menyebutkan bahwa cendekiawan (toakenawanawa) mencintai perbuatan dan kata yang benar, waktu menghadapi kesulitan dia memikirkannya kembali, dan berhati-hati melaksanakan segala sesuatu
4. Getteng= Keteguhan (Firm) dalam bahasa Indonesia artinya teguh, kata inipun berarti tetap-asas atau setia pada keyakinan, atau kuat dan tangguh dalam pendirian, erat memegang sesuatu. Sama halnya dengan nilai kejujuran, nilai kecendekiaan dan nilai kepatutan, nilai keteguhan ini terikat pada makna yang positif. Ini dinyatakan oleh To Ciung Maccae ri Luwu bahwa empat perbuatan

nilai keteguhan (a) Tak mengingkari janji, (b) tak mengkhianati kesepakatan, (c) tak membatalkan keputusan, tak mengubah kesepakatan, dan (d) jika berbicara dan berbuat, tak berhenti sebelum rampung. Dalam perjanjian persahabatan negara-negara Bugis-Makassar yang masih tetap diakui bersama, antara lain ditetapkan : ”bahwa barangsiapa yang lebih dahulu menemukan suatu jalan yang lebih baik, maka berjanjilah siapa-siapa yang menemukan kebajikan itu lebih dahulu supaya memberitahunya kepada raja-raja lainnya. Perjanjian inilah yang menjadi dasar penerimaan Raja Bone dan raja-raja Bugis lainnya. Akan tetapi setelah beliau mengumumkan keislamannya ternyata rakyat Bone menolak seruan beliau. Ini terjadi pada waktu baru saja tiga bulan beliau bertakhta. Atas penolakan ini, beliau melepaskan kedudukannya, lalu pergi ke Pattiro, di negeri mana beliau dahulu sebagai Arung yang memerintah (Arung Pattiro). Rakyat di sini pun menolak dakhwah Islamiah yang disampaikan beliau, kemudian beliau berangkat ke Tallo, Gowa; dan dari sini beliau ke Bantaeng untuk berdiam disitu. Di sinilah beliau mangkat, sehingga beliau disebut *Matinroe ri Bantaeng*.

Konsep *siri'* menurut Limpo (dalam Darwis dan Dilo 2012:4) ialah berdasarkan pengertian bahasa adalah suatu sistem nilai sosial budaya dan kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Adapun pengertian *pacce*

secara harfiah, yaitu *pacce* berarti perasaan pedis, perih atau pedih. Sedangkan pengertian *pacce* menurut istilah, adalah suatu perasaan yang menyayat hati, pilu bagaikan tersayat sembilu apabila sesama warga masyarakat atau keluarga atau sahabat ditimpa kemalangan.

Siri' na *pacce* merupakan budaya yang telah melembaga dan dipercaya oleh suku Makassar, maka untuk membahas lebih lanjut tentang falsafat tersebut perlu ada penelitian dan pengkajian tentang sejarah dan konsep *siri'* na *pacce* yang ada pada suku Makassar sejak zaman dahulu. Suku Makassar yang mendiami sebagian wilayah Sulawesi Selatan merupakan penduduk asli yang sudah memiliki pranata budaya tersendiri (Limpo dalam Darwis dan Dilo, 2012:5).

Moein (dalam Darwis dan Dilo, 2012:7) lebih lanjut memaparkan beberapa istilah tentang *siri'* dan maknanya, antara lain *sirik (siri')* sebagai harga diri atau kehormatan; *mappakasiri'*, artinya dinodai kehormatannya; *ritaroang sirik (siri')*, artinya ditegaskan kehormatannya *passampo siri'*, artinya penutup malu *tomasiri'na* artinya keluarga pihak yang dinodai kehormatannya *sirik (siri')* sebagai perwujudan sikap tegas demi kehormatan tersebut *sirik (siri')* sebagai pernyataan sikap tidak serakah (*mangowa*) *sirik (siri')* *naranreng*, artinya dipertaruhkan demi kehormatan *siriksirik (siri'-siri')*, artinya malu-malu *palaloi siriknu (siri'nu)*, artinya tantang yang melawan *passirikia*, artinya bela kehormatan saya *napakasirikka (napakasiri'ka)*, artinya saya dipermalukan *tau tena sirikna (siri'na)*, artinya orang tak ada malu, tak ada harga diri.

Oleh karena itu, untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, perlu menerapkan nilai-nilai lokal kebijaksanaan dengan memodifikasi substansi dari nilai-nilai ini dalam prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Menurut Alting (2012:30) konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Sejak era reformasi bergulir, masyarakat hukum adat seluruh Indonesia banyak melakukan penuntutan penuntutan kembali hak mereka yang dirampas secara paksa atau dengan cara lain, baik oleh pemerintah maupun kelompok orang tertentu. Gerakan melakukan penuntutan hak ini sering diwarnai dengan adanya konflik horizontal maupun vertical. Beberapa contoh kasus konflik di dalam kawasan hutan pada fungsi hutan dan areal yang berbeda-beda antara lain: Konflik Masyarakat Adat Moronene, Sulawesi Tenggara dengan

Pengelola Taman Nasional Rawa Opa Watumohai pada Kawasan Konservasi (Bediona dalam Sugiswati, 2012:33).

B. Inovasi

1. Pengertian Inovasi

Inovasi telah ada landasan hukumnya dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bertajuk Inovasi Daerah. Dari Pasal 386 hingga pasal 390 UU 23/2014. Inovasi yang dimaksud dalam pasal 386 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk pembaharuan antara lain penerapan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan inovasi daerah mengacu pada prinsip:

- a. Peningkatan efisiensi;
- b. Perbaikan efektivitas;
- c. Perbaikan kualitas pelayanan;
- d. Tidak ada konflik kepentingan;
- e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. Dilakukan secara terbuka;
- g. Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. Dapat dipertanggung jawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Sedermayanti dalam Marom (2015:54) menyatakan bahwa inovasi meliputi penciptaan sesuatu yang tidak ada saat ini dan dapat berupa penciptaan kecil atau sesuatu yang monumental. Inovasi sukses memiliki lima

karakteristik berikut: Cukup baru bagi pasar; Berdasarkan teknologi yang telah diteliti dan dites; Menghemat uang pengguna inovasi; Memenuhi kebutuhan pelanggan; Mendukung praktek yang ada. Enam faktor ide menaruh perhatian terhadap bagaimana ide inovasi diawali, yaitu: Mendeteksi kebutuhan: aktif mencari jawaban terhadap masalah yang diketahui; Mendeteksi solusi, menemukan cara baru menggunakan teknologi yang ada; Penemuan mental; hal yang diimpikan di kepala dengan sedikit acuan terhadap dunia luar; Peristiwa acak: saat tidak disengaja ketika inovator menemukan sesuatu yang mereka tidak cari tapi segera mengenali pentingnya hal tersebut; Penelitian pasar: teknik penelitian pasar tradisional untuk menemukan berbagai ide; Mengikuti tren: mengikuti tren demografis dan tren meluas lainnya serta berusaha mengembangkan ide yang mungkin relevan.

Robbins (dalam M. Tahir dan Harakan 2017:16) lebih memfokuskan inovasi pada tiga hal utama yaitu:

1. Gagasan baru yaitu suatu olah pikir dalam mengamati suatu fenomena yang sedang terjadi termasuk dalam bidang pendidikan gagasan baru ini dapat berupa penemuan dari suatu gagasan pemikiran, Ide, sistem sampai pada kemungkinan gagasan yang mengkristal.
2. Produk dan jasa yaitu hasil langkah lanjutan dari adanya gagasan baru yang ditindak lanjuti dengan berbagai aktivitas, kajian, penelitian dan percobaan sehingga melahirkan konsep yang lebih konkret dalam bentuk produk dan jasa yang siap dikembangkan

dan diimplementasikan termasuk hasil inovasi dibidang pendidikan.

3. Upaya perbaikan yaitu usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan (*improvement*) yang terus menerus sehingga buah inovasi itu dapat dirasakan manfaatnya.

Secara khusus inovasi di dalam lembaga publik bisa didefinisikan sebagai penerapan (upaya membawa) ide-ide baru dalam implementasi, dicirikan oleh adanya perubahan langkah yang cukup besar, berlangsung cukup lama dan berskala cukup umum sehingga dalam proses implementasinya berdampak cukup besar terhadap perubahan organisasi dan tata hubungan organisasi. Inovasi dalam pelayanan publik mempunyai ciri khas, yaitu sifatnya yang *intangible* karena inovasi layanan dan organisasi tidak semata berbasis pada produk yang tidak dapat dilihat melainkan pada perubahan dalam hubungan pelakunya, yaitu antara *service provider* dan *service receiver (users)*, atau hubungan antar berbagai bagian di dalam organisasi atau mitra sebuah organisasi (Salahuddin. dkk, 2017:7).

Menurut Metcalfe dalam Zuhriyati dkk (2012:9) inovasi merupakan sistem yang menghimpun institusi-institusi berbeda yang berkontribusi, secara bersama maupun individu, dalam pengembangan dan difusi teknologi-teknologi baru dan menyediakan kerangka kerja (*framework*) di mana pemerintah membentuk dan mengimplementasikan kebijakan- kebijakan untuk mempengaruhi proses inovasi.

2. Inovasi dalam Pemerintahan

Strategi inovasi dalam pemerintahan menurut Sangkala (dalam M. Tahir dan Harakan, 2015:284) yaitu:

- a. Layanan terintegrasi, dimana sektor publik menawarkan peningkatan sejumlah layanan, warga memiliki harapan yang tidak sederhana dimana warga meminta layanan yang disediakan disertai dengan kenyamanan.
- b. Desentralisasi pemberian dan monitoring layanan lebih dekat dengan masyarakat dan biasanya membentuk kepastian terhadap tingkat permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat atau pelaku bisnis.
- c. Pemanfaatan kerjasama, bermakna sebagai pemerintahan yang inovatif untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih efisien dalam pemberian layanan publik, lebih kolaboratif antar organisasi dan juga terjadi kerjasama antara publik dan swasta.
- d. Pelibatan warga Negara. Kewenangan pemerintah yang inovatif harus merealisasikan peran-peran pentingnya dengan mendorong peran warga untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan.
- e. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

Dari yang telah dijelaskan ahli di atas, dapat dilihat apa saja tolak ukur yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi strategi inovasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Bantaeng. Dengan berbagai indikator seperti gagasan baru, produk dan jasa yang merupakan

hasil dari gagasan baru, upaya perbaikan dalam penyempurnaan inovasi sehingga dapat dirasakan manfaatnya, unsur inovasi kebijakan, unsur inovasi dalam pembuatan kebijakan, unsur mengembangkan inovasi dan penyebarannya, hingga strategi yang diterapkan dalam inovasi pemerintah di Kabupaten Bantaeng.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, gambaran kerangka pikir terkait dengan eksistensi nilai nilai lokalitas dalam inovasi pemerintah daerah di Kabupaten Bantaeng dijabarkan dalam 5 indikator. Adapun kelima indikator tersebut bersesuaian dengan yang dijelaskan oleh Sangkala (dalam M. Tahir dan Harakan, 2015:284), yaitu: “(1) Layanan terintegrasi, (2) Desentralisasi (3) Pemanfaatan kerjasama, (4) Pelibatan warga Negara, (5) Teknologi informasi dan komunikasi, serta hasil yang ingin dicapai terkait ada tidaknya nilai nilai lokalitas yang termodifikasi dari nilai nilai umum yang ada di Sulawesi selatan yakni: (1) Nilai kejujuran, (2) Nilai cendekia, (3) Nilai Kepatutan, dan (4) Nilai keteguhan (Toriolo dalam Idrus 2015:241)”.

Gambar 3.1. Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitiannya ialah layanan integrasi, desentralisasi, pemanfaatan kerja sama, pelibatan warga Negara, teknoogi informasi dan komunikasi, serta bagaimana eksistensi nilai lokal itu sendiri yang masuk kedalam program inovasi yang ada di Kabupaten Bantaeng yang terbagi dalam nilai kejujuran, cendekia, kepatutan, keteguhan.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

- a. Layanan terintegrasi, adalah dimana sektor publik menawarkan peningkatan sejumlah layanan kepada warga Bantaeng yang

- memiliki harapan yang tidak sederhana dimana warga meminta layanan yang disediakan disertai dengan kenyamanan
- b. Desentralisasi pemberian dan monitoring layanan lebih dekat dengan masyarakat dan biasanya membentuk kepastian terhadap tingkat permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat atau pelaku bisnis yang berada di Bantaeng
 - c. Pemanfaatan kerjasama, bermakna sebagai pemerintahan yang inovatif untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih efisien dalam pemberian layanan publik , lebih kolaboratif antar organisasi dan juga terjadi kerjasama antara publik dan swasta yang berada di Kabupaten Bantaeng
 - d. Pelibatan warga Negara. Kewenangan pemerintah yang inovatif harus merealisasikan peran-peran pentingnya dengan mendorong peran warga Bantaeng untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan.
 - e. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan memudahkan akses informasi yang dibutuhkan melalui komunikasi yang memanfaatkan teknologi sehingga penyebarannya menyeluruh dalam lingkup Kabupaten Bantaeng
 - f. Nilai kejujuran ialah nilai utama dalam bersikap seluruh masyarakat Bantaeng dimana kejujuran ini melekat sebagai bagian dari harga diri (Siri') masyarakat Bantaeng

- g. Nilai cendekia yang dimaksud perbuatan dan kata yang benar, oleh masyarakat dan pemerintah Bantaeng waktu menghadapi kesulitan dia memikirkannya kembali, dan berhati-hati melaksanakan segala sesuatu.
- h. Nilai kepatutan ialah bagaimana kelayakan pemerintah Bantaeng atau sebuah program inovasi itu mampu menjaga kelayakannya dan diterima oleh masyarakat Bantaeng
- i. Nilai keteguhan yang dimaksud disini bagaimana masyarakat Bantaeng tidak mengingkari janji atau membatalkan kesepakatan dan juga mengerjakan sesuatu tidak berhenti hingga selesai

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini kurang lebih selama dua bulan yang dilaksanakan pada bulan oktober hingga november. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng, karena Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan bahkan di Indonesia yang sudah menerapkan prinsip *Good Governance* dan diakui oleh pemerintah pusat serta mendapat berbagai penghargaan dari berbagai bidang. Di samping itu, Kabupaten Bantaeng juga melakukan inovasi Pemerintahan tanpa melupakan nilai nilai lokal. Lokasi penelitian ini di ambil dengan asumsi bahwa daerah tersebut berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang bersifat objektif dan menyeluruh serta mendalam.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2014), metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).
2. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data yang rinci dari suatu

fenomena yang di teliti, dalam hal ini tentang eksistensi nilai lokal dalam inovasi pemerintah di Kabupaten Bantaeng

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer, adalah suatu obyek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut "*first-hand information*" atau data yang dikumpulkan dari situasi aktual secara langsung dari responden berdasarkan wawancara yang mendalam (*in deep interview*) ataupun hasil observasi dari apa yang terjadi dilapangan.
2. Data Sekunder, merupakan data yang dikumpulkan dan telah diolah sebelumnya dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang sudah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap mengetahui masalah terkait daripada penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini, adalah :

1. Kasubag Pengembangan dan Inovasi Bappeda Bantaeng
2. Kabag Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bantaeng
3. Dokter yang di fungsikan pada BSB dari Dinas Kesehatan Bantaeng
4. Tokoh Masyarakat Bantaeng
5. Masyarakat yang pernah merasakan manfaat dari BSB

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan usaha mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa fakta, data dan informasi yang sifatnya *valid* (sebenarnya), *reliable* (dapat dipercaya) dan *objective* (sesuai dengan kenyataan). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

1. Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.
2. Interview atau wawancara (*in dept interview*) yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali yang lebih mendalam berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
3. Studi pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.
4. Dokumentasi, yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013), bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian hingga tuntas hingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ialah tidak ditemukannya lagi data atau informasi baru. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

G. Teknik Pengabsahan Data

Sugiyono (2016:241), mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pengabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan untuk data. Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara sehingga trigulasi dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Triangulasi Sumber, yaitu dengan membandingkan melalui sumber berbeda sampai mendapatkan kebenaran
- b. Triangulasi Teknik, yaitu menguji kreabilitas data yang dilakukan dengan cara menggunakan teknik yang berbeda namun cara mengecek data sumber yang sama
- c. Triangulasi waktu, yaitu dengan melakukan wawancara, observasi atau dengan melakukan teknik lain dengan situasi dan waktu yang berbeda. Sampai mendapatkan kepastian data

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan oktober hingga November di instansi Pemerintahan Kabupaten Bantaeng yakni, di Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta tokoh masyarakat yang mengetahui ataupun berperan langsung terkait mengenai eksistensi nilai lokal dan inovasi di Kabupaten Bantaeng, ataupun yang berperan langsung dalam pembentukan program inovasi yang berbentuk Brigade Siaga Bencana, sebagai salah satu inovasi program pemerintah Kabupaten Bantaeng.

1. Kondisi Geografis Kabupaten Bantaeng



Gambar. 4.1 letak Geografis Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng adalah salah satu dari 24 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan. Berada di kawasan selatan Sulawesi Selatan dengan jarak kurang lebih 120 km dari Kota Makassar. Terletak di antara **5°21'13''** - **5°35'26''** Lintang Selatan dan **119°51'42''**-**120°05'27''** Bujur Timur.

Kabupaten Bantaeng terletak di wilayah pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan, jarak dari Ibu kota Provinsi ± 120 Km. Jika menggunakan kendaraan bermotor maka jarak tempuh ke kabupaten Bantaeng $\pm 3-4$ jam.

Luas wilayah Kabupaten Bantaeng $\pm 395,83$ Km² dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto.
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto dan laut Flores.
3. Sebelah utara : Berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba dan Sinjai.
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba.

NO	Nama Kecamatan	Nama Desa / Kelurahan
1.	Bissappu	Bonto Manai, Bonto Lebang, Bonto Atu, Bonto Rita, Bonto Langkasa, Bonto Jaya, Bonto Jai, Bonto Cinde, Bonto Loe, Bonto Salluang.
2.	Bantaeng	Tappanjeng, Pallantikang, Letta, Mallilingi, Lembang, Lamalaka,

		Karatuang, Onto, Kayu Loe
3.	Eremerasa	Ulugalung, Lonrong, Barua, Kampala, Pa'Bentengan, Mappilawing, Pa'Bumbung, Mamampang, Parang Loe
4.	Tompo Bulu	Lembang Gantarangkeke, Banyorang, Campaga, Ereng Ereng, Labbo, Pattaneteang, Pattallassang, Bonto Bontoa, Bonto Tappalang, Balumbung
5.	Pa'jukukang	Biangkeke, Pa'jukukang, Biangloe, Borong Loe, Baruga, Nipa Nipa, Papan Loe, Rappoa, Lumpangan, Batu Karaeng
6.	Uluere	Bonto Marannu, Bonto Tangnga, Bonto Tallasa, Bonto Rannu, Bonto Daeng, Bonto Lojong
7.	Gantarangkeke	Gantarangkeke, Tanah Loe, Layoa, Bajiminasa, Tombolo, Kaloling
8.	Sinoa	Bonto Tiro, Bonto Karaeng, Bonto Maccini, Bonto Mate'ne, Bonto Majannang, Bonto Bulaeng.

Tabel 4.1. Daftar Kecamatan serta Desa dan Kelurahan yang ada di Bantaeng

2. Visi Misi Dinas yang Terlibat dalam Program Inovasi

a. Dinas Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng

Adapun visi misi dari dinas badan pembangunan daerah di kabupaten bantaeng yaitu :

Visi BAPPEDA : "Mewujudkan Bappeda sebagai Perencana yang Partisipatif, berkualitas dan visioner yang mendukung Bantaeng sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Bagian Selatan Sulawesi Selatan"

Penjelasan Visi:

1. Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh BAPPEDA kabupaten Bantaeng sebagai suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah. Bappeda Kabupaten Bantaeng berkewajiban menyusun rencana pembangunan dan selalu mempertimbangkan pengalaman empiris masa lalu, kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijaksanaan perencanaan untuk masa yang akan datang.
2. Makna partisipatif adalah proses perencanaan pembanguan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan consensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap

perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.

3. Makna berkualitas adalah apabila hasil-hasil perencanaan memenuhi beberapa criteria, dalam rangka kerangka visi di atas ditetapkan tiga criteria, yaitu:
 - a) Berbasis local dimaknai bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi local dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan local. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.
 - b) Mendukung perencanaan pembangunan nasional dimaknai bahwa perencanaan pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.
 - c) Akomodatif terhadap dinamika global, dimaknai bahwa perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka

berpikir global dan bertindak untuk kepentingan local (*think globally act locally*).

- d) Makna visioner adalah memiliki wawasan kedepan yang selalu mengutamakan prinsip partipatif, inovatif, adaptif, antisipatif, dan bertanggung jawab.
- e) Sedangkan mendukung bantaeng sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di bagian selatan sulsel bahwa perencanaan pembangunan daerah selaras dengan visi yang diemban Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng Periode 2013-2018 berdasarkan Perda Kab. Bantaeng No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan RPJMD

Misi BAPPEDA :

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. Rumusan misi BAPPEDA Kabupaten Bantaeng adalah:

1. Merealisasikan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang akuntabel
2. Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan dan Penelitian Pengembangan.

Penjelasan Misi:

1. Merealisasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang akuntabel. Pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipatif aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipatif aktif *stakeholders* agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif *stakeholders* dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan yang dihasilkan juga harus integrated, artinya hasil-hasil perencanaan dapat diterapkan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. Koordinasi yaitu kerjasama untuk membina saling pengertian/pemahaman. Integrasi yaitu keterpaduan untuk mencapai hasil yang optimal. Sinkronisasi yaitu keselarasan untuk meminimalisasi konflik dan/atau dampak negatif. Simplifikasi

yaitu penyederhanaan untuk kecepatan dan mudah mengerti. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan Rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi Kinerja Pembangunan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja bersinergi dengan dokumen rencana pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan. Setiap instansi berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan yang akuntabel.

2. Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan data dan atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat.

3. Meningkatkan kemampuan sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan dan Penelitian Pengembangan. Sebagai penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral multidisipliner dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas SDM merupakan peningkatan kualitas individu dalam mengemban bebas tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja terkait dengan kesetiaan, logika dan etika. Meningkatkan kapasitas instansi perencanaan dengan mengupayakan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan baik personil maupun kelembagaan merupakan upaya untuk mewujudkan pelayanan prima kepada semua pihak.

b. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng

Adapun visi misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng yaitu :

Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berkarakter, religi dan berkearifan lokal guna mewujudkan Bantaeng yang sejahtera dan berkeadilan.

Sedangkan, Misi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:

1. Meningkatkan pemerataan aksesibilitas pelayanan pendidikan yang bermutu menuju standar nasional pendidikan, termasuk pelayanan untuk pembinaan kebudayaan,
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, termasuk pengembangan pendidikan karakter untuk pembentukan kepribadian,
3. Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab,
4. Pembinaan dan pelestarian kebudayaan untuk mendukung terbentuknya generasi yang berkarakter.

c. Dinas Kesehatan

Adapun visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, yaitu :

Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng:

Menuju Kabupaten Sehat yang Mandiri dan Berkualitas Tahun 2018

Adapun misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng:

1. Memasyarakatkan paradigma sehat
2. Profesionalisme petugas kesehatan
3. Pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan kesehatan
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan

Jika kita mengambil kesimpulan dari visi misi dari ketiga instansi di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baik visi dan misi yang ada di

instansi Pemerintahan Badan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan itu terbangun dari kesadaran pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai bagian masyarakat serta usaha sadar dalam mempertahankan nilai-nilai lokal yang ada di Bantaeng diantaranya seperti pendidikan yang tidak terlepas dari nilai lokal, dan menyikapi sumber daya manusia yang profesional, mandiri, kreatif dan bertanggung jawab, apalagi bergerak di bidang teknologi informasi.

Jika diperhatikan di lapangan bahwa secara tidak langsung program-program yang berjalan seperti program BSB atau Inovasi program Brigade Siaga Bencana tidak terlepas dari nilai-nilai lokal yang ada di Kabupaten Bantaeng secara khusus dan di Provinsi Sulawesi Selatan secara umumnya seperti diantaranya ialah nilai kejujuran, semisal pelaksana dalam program kesehatan, perawat supir dan dokter secara betul-betul menangani pasien sekalipun proses pemanggilan tim kesehatan hanya melalui via telepon tetapi mereka tetap melaksanakan tugasnya secara jujur bertanggung jawab dan di dasari oleh rasa kemanusiaan yang tinggi serta rasa empati yang mendalam.

B. Program Inovasi Brigade Siaga Bencana (BSB) Kabupaten Bantaeng

Pada tahun 2008, status dan derajat kesehatan di Kabupaten Bantaeng masih rendah. Beberapa indikator antara lain, angka kematian ibu (AKI) angka kematian Bayi (AKB). angka kasus gizi buruk. dan lain-lain, sehingga program inovasi kemudian hadir di Kabupaten Bantaeng. Seperti beberapa kasus-kasus yang telah di jelaskan di atas ternyata perempuan juga sangat rentan terhadap masalah kesehatan dan masih sangat banyak lagi persoalan-

persoalan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat secara umumnya apalagi yang berada di daerah terpencil dan mempunyai akses yang sangat sulit untuk ditempuh, hal ini menunjukkan bahwa selain kesehatan ada hal lain yang sangat krusial untuk di perhatikan yaitu mengenai akses.

Dan tepat pada tahun 2009, akses menjadi hal fokus pemerintah pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat sangat perlu diperhatikan, selain karena adanya beberapa masalah yang ditunjukkan di atas, ternyata ada masalah yang sangat urgen, yakni akses untuk melaksanakan program Brigade Siaga Bencana atau (BSB).

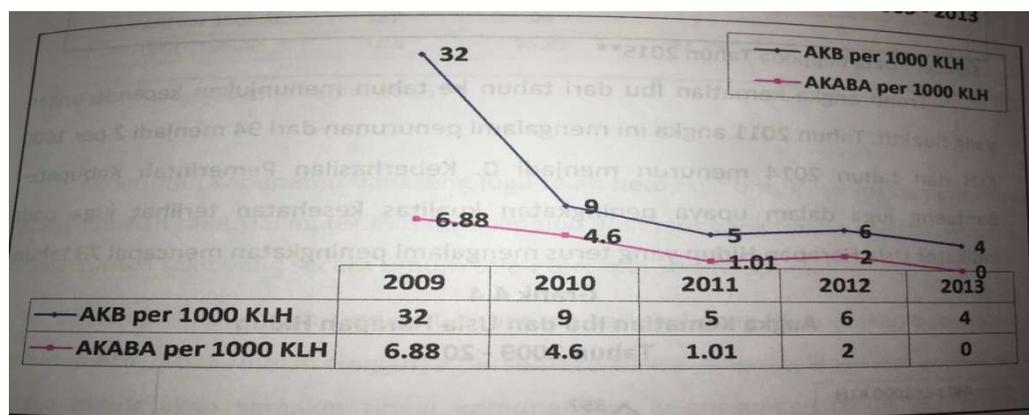
Berdasarkan PERDA Kabupaten Bantaeng No. 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng BSB hadir sebagai program inovasi peningkatan angka kesehatan di Kabupaten Bantaeng. Salah satu faktor paling dominan tingginya angka kematian di Kabupaten Bantaeng ialah kondisi geografis dan topografis wilayah, sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sangat minim. Bagi Kecamatan dengan aksesibilitas rendah, jarak dan waktu tempuh menuju sarana kesehatan terdekat mencapai 60 sampai 90 menit. Sementara untuk kasus berat yang memerlukan penanganan bersifat spesialisik waktu tempuh terjauh wilayah Kabupaten Bantaeng dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah 45 menit.

Brigade Siaga Bencana (BSB) adalah sebuah program inovasi berbasis layanan publik yang bergerak di bidang kesehatan, yang di mana fokus

inovasinya ialah pada pelayanan yang bergerak cepat dengan sarana *mobile service*, memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang sepadan dengan Rumah Sakit pada umumnya di mana sistem pelayanan ini disebut sebagai sistem “jemput bola”. Sistem tersebut ialah di mana tim medis dari BSB mendatangi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Hal ini, lebih di efisienkan dengan di tempatkannya 5 posko utama BSB yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bantaeng. Pembagian posko ini diharapkan bisa mempersingkat waktu tempuh tim BSB jika dibandingkan jarak waktu tempuh pasien semisal berada di daerah pelosok Desa menuju Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Kota Bantaeng.

Trend angka kematian Ibu dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang fluaktif. Tahun 2012 angka kematian bayi 6 kasus pada tahun tersebut menurun menjadi 4 kasus. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantaeng juga dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan terlihat pada indikator Usia Harapan Hidup yang mencapai 73 Tahun.



Tabel 4.2. Statistik Angka Kematian Ibu dan Anak

(Sumber: “Buku Napak Tilas: Kabupaten Bantaeng di Balik Bingkai Brigade Siaga Bencana”).

Adapun hasil wawancara dengan narasumber dengan inisial NS sebagai aparatur Pemerintahan di bagian Inovasi dan Pengembangan pada BappedA mengenai sejarah terbentuknya program inovasi yang ada di Kabupaten Bantaeng yakni:

“Brigade Siaga Bencana (BSB) diusung oleh Bupati Bantaeng yang pada saat itu dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr. beserta aparatur Pemerintah Daerah untuk memperbaiki status dan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/MDGs) bidang kesehatan pada tahun 2008 di antaranya, yakni: (a) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Salah satu target spesifik yang telah ditetapkan untuk tujuan ini adalah antara lain menurunnya jumlah balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi, (b) menurunkan angka kematian anak hingga 2/3 dalam kurun waktu 1990-2015, (c) meningkatkan kesehatan ibu, (d) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, dan (e) memastikan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu target spesifik yang telah ditetapkan untuk tujuan ini adalah menurunkan hingga setengah proporsi rumah tangga tanpa akses keberlanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga 2015.”

Selain itu narasumber juga mengungkapkan bahwa :

“Kelompok yang menjadi sasaran utama kegiatan pelayanan kesehatan BSB adalah kelompok yang mempunyai daya ungkit paling besar dalam pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDGs) antara lain balita dengan berat badan rendah/kurang gizi, bayidan balita, ibu hamil ataupun melahirkan, dan penduduk yang menderita penyakit menular. Adapun langkah langkah dan strategi yang dilakukan menggunakan sistem jemput bola dalam memecahkan masalah tersebut dalam bentuk inisiatif sebagai berikut: (a) menghadirkan sarana pelayanan mobile yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bantaeng, (b) menyiapkan tenaga kesehatan terampil dan sarana ambulance keliling yang representative, (c) mensosialisasikan melalui media komunikasi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama tentang keberadaan sarana ambulance mobile,(d) menyiapkan sarana pelayanan di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten untuk mengantisipasi kondisi yang mengharuskan proses terjadinya rujukan langsung maupun tidak langsung, (e) melatih masyarakat melalui *Medical First Responder* (MFR) dalam

meningkatkan respon awal penanganan kasus kegawatdaruratan.”

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa beberapa program dalam inovasi Brigade Siaga Bencana (BSB) tidak lain adalah peningkatan layanan kesehatan melalui program yang ada seperti penanggulangan kemiskinan dan kelaparan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat kelas ekonomi ke bawah, mengurangi kematian balita dan resiko ibu melahirkan serta mengandung, serta memastikan kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu program kebersihan baik di rumah maupun di sekitar. Hal ini dilakukan untuk memastikan air minum yang layak demi kesehatan lingkungan dan hal-hal lainnya.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Kasubag instansi Bappeda, peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses pengembangan dan perencanaan hingga tahap sosialisasi BSB, Bappeda juga memberikan sebuah buku yang berjudul “Napak Tilas *The New Bantaeng* Dalam Bingkai Brigade Siaga Bencana (BSB)” kepada masyarakat untuk bahan referensi bacaan. Selain itu, peneliti juga menemukan beberapa informasi rujukan-rujukan mengenai BSB itu sendiri.

Selain itu, faktor ekonomi dan sosial budaya mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menentukan pelayanan kesehatan. Kondisi ini menyebabkan kasus resiko tinggi Ibu melahirkan yang membutuhkan penanganan segera juga mengalami keterlambatan. Hal ini diperburuk dengan kondisi lingkungan tinggal dengan faktor resiko rawan penyakit seperti

daerah kumuh dan tertinggal, rawan banjir, dan sanitasi kesehatan yang tidak memadai. Seperti kasus kesehatan yang disebabkan yakni infeksi dan berbasis lingkungan seperti tuberculosis, demam berdarah dengue (DBD), serta diare sangat mudah ditemui.

Narasumber yang merupakan bagian dari pelaksana program BSB yaitu DA selaku dokter yang bertugas dalam BSB mobile, mengungkapkan:

“Inovasi BSB ini itu terbentuk dari masa kepemimpinan awal Prof Nurdin sebagai salah satu pimpinan daerah di Kabupaten Bantaeng. Dari beberapa program yang muncul ada beberapa program program unggul salah satunya adalah BSB itu sendiri. Dalam proses pelaksanaannya, sebagian masyarakat menerima dan ada juga beberapa masyarakat yang tidak terlalu merespon terkait hadirnya program ini. Hal ini diakibatkan oleh sosialisasi tentang nilai positif mengenai program ini belum merata sepenunya, namun seiring berjalannya waktu program ini mengalami peningkatan. Program yang ada di BSB tidak hanya mencakup satu instansi saja, melainkan semua elemen Pemerintahan harus turun tangan seperti TNI dan Polisi yang dalam pekerjaannya yaitu mengatur lalu lintas ataupun bertindak langsung sebelum tim BSB hadir di lokasi apabila seperti kasus kecelakaan lalu lintas. Selain itu, Dinas Bappedalda juga menangani lingkungan hidup seperti sosialisasi kebersihan, air bersih, dan lain lain, yang intinya ialah semua elemen pemerintah bekerja sama dengsn baik agar program ini terlaksana dengan cepat dan baik, dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak tersentuh baik di area perkotaan, pinggir kota, ataupun di daerah yang terpencil yang membutuhkan waktu lama dalam proses menuju waktu ke tempat kejadian. Dan hal yang paling perlu dipahami oleh masyarakat adalah bagaimana masyarakat harus saling lebih interaktif dalam komunikasi, sebab ada beberapa wilayah di Bantaeng sangat susah dalam hal jaringan untuk berkomunikasi, padahal proses pemanggilan BSB ini melalui call center 119. Ada beberapa bagian kecil masyarakat di wilayah terpencil Bantaeng masih menggunakan obat tradisional sebagai penyembuhan tanpa ada kosnultasi dengan dokter atau pihak yang berwenang untuk menangani, sehingga ada beberapa kasus kesehatan susah untuk ditangani karena adanya infeksi dan beberapa penyakit lain sudah parah dan susah untuk ditangani. Hal hal seperti inilah yang mesti dikurangi ataupun dihilangkan agar supaya kasus dan resiko

penyakit berkurang, serta keunggulan program BSB ini yaitu sistem mobile dimana dalam sistem mobile ini dokter dapat melakukan tindakan medis seperti operasi di atas kendaraan apabila pasien memang membutuhkan tindakan lebih cepat jika jarak tempuh dan lokasi kejadian terbilang lumayan jauh.”

Dari hasil wawancara dengan narasumber selaku dokter yang terlibat langsung dalam beroperasinya BSB, dapat disimpulkan bahwa kehadiran dari program inovasi BSB ini dimulai sejak awal kepemimpinan bupati Nurdin Abdullah, tetapi pada awal pengoperasiannya seluruh masyarakat Bantaeng masih belum mengetahui kehadiran dari BSB. Dengan hadirnya BSB, mempermudah akses kesehatan seluruh lapisan masyarakat Bantaeng mulai dari yang tinggal di wilayah perkotaan hingga di wilayah terpencil Kabupaten Bantaeng. Hanya dengan menghubungi call center di 119 tim BSB akan langsung menuju lokasi yang membutuhkan pertolongan terkait kesehatan ditambah dengan keunggulannya, pasien yang dalam kondisi gawat darurat, dokter dapat melakukan tindakan medis langsung di BSB mobile. Namun salah satu kendala dalam BSB yaitu teknologi komunikasi. Jika komunikasi pada wilayah yang membutuhkan BSB terganggu, informasi terkait masyarakat yang membutuhkan pertolongan kesehatan tidak tersampaikan dengan cepat.

Langkah kunci yang harus disepakati adalah komitmen dan integritas dari para *stake holder* pemberi pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilakukan BSB berdasarkan visi yaitu mewujudkan Bantaeng sehat, mandiri, berkualitas pada Tahun 2015. Visi ini dilaksanakan melalui misi yaitu:

1. Pemerataan dan peningkatan kualitas dan mutu pelayanan Brigade Siaga Bencana
2. Meningkatkan mutu, sarana dan prasarana, pelayanan Brigade siaga Bencana
3. Meningkatkan sistem informasi kesehatan
4. Pemerataan dan perluasan jangkauan

C. Eksistensi Nilai Lokal dalam Program Inovasi Brigade Siaga Bencana

Dalam proses pengusulan dan perumusan program inovasi Brigade Siaga Bencana (BSB) ini, pemerintah Kabupaten Bantaeng tidak luput melibatkan tokoh masyarakat seperti, pemangku adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, dan orang-orang yang paham terkait nilai-nilai lokal itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar proses kerja dan standar prosedur dalam cara kerja BSB tidak meninggalkan adat-adat, budaya dan nilai yang dianut dalam sistem bermasyarakat di Kabupaten Bantaeng.

Dan hasilnya, program BSB ini hadir tidak hanya sebagai usulan dari kacamata pemerintah melihat rendahnya angka kesehatan, tetapi juga berdasar dari masukan-masukan masyarakat sebagai bentuk aspirasi dan harapannya kepada pemerintah dalam pemberian pelayanan dan kenyamanan namun bersesuaian dengan adat istiadat dari nilai lokal yang di anut masyarakat Bantaeng. Jika merujuk kepada teori nilai lokal yang terkandung dalam program BSB ini merupakan sebuah bentuk difusi inovasi yang di dalamnya terjadi tranformasi budaya lokal sehingga konteks budaya bisa terserap dalam inovasi dan beradaptasi pada konteks kekinian saat ini.

Ada dua bentuk nilai lokal yang terkandung dalam BSB yaitu secara material (fisik) dan secara nonmaterial (abstrak). Secara material program BSB ini menghadirkan inovasinya dengan adanya tim medis yang siaga 24 jam dan sarana *mobile service* dengan sistem jemput bola atau pelayanan cepat sehingga waktu jarak tempuh bisa dipersingkat antara pasien dan tim BSB itu sendiri. Secara nonmaterial, tim BSB bekerja dengan rasa di mana pada pengoperasiannya memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar masyarakat yang membutuhkan penanganan disertai kenyamanan.

Pada pengumpulan informasi peneliti melakukan wawancara dengan narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Kabag Kebudayaan berinisial HR. beliau mengungkapkan bahwa:

“Program inovasi yang disusun oleh pemerintah tidak serta merta disusun oleh kerjasama antar instansi pemerintah saja, ada beberapa elemen masyarakat yang dianggap perlu lebih awal untuk mengetahui program ini yang kemudian diajak kerja sama untuk menyusun program BSB ini, diantaranya seperti tokoh masyarakat, tokoh masyarakat adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda dan masyarakat lain lain. Program ini berdiri secara berkesinambungan dan bertahap demi tahap, agar masyarakat paham betul efek yang lahir ataupun dampak jika program BSB ini berjalan. Setelah program tersebut mulai beroperasi, beberapa bagian masyarakat mulai mengerti terkait program BSB. Masyarakat juga diajarkan langsung bagaimana menanggulangi atau penanggulangan pertama untuk mencegah bibit penyakit serta keadaan yang tidak diinginkan muncul di tengah tengah masyarakat, seperti penyakit menular, diare, dan lain lain dan diadakan merata, dan dilatih sedini mungkin seperti program pengajaran kesehatan di sekolah sekolah, lingkungan Pemerintahan, penyampaian aspirasi secara meyeluruh mulai dari aspek kalangan masyarakat hingga di perangkat pemerinhtah. Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat dapat menyampaikan langsung apa yang menjadi keluh kesah atau masalah yang dihadapi dan dapat ditanggulangi oleh pemerintah dengan cepat.”

Dari hasil wawancara dengan narasumber selaku Kabag Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa inovasi program BSB tidak disusun oleh instansi pemerintah saja, tapi melibatkan pula masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat yang dianggap berpengaruh lainnya. Pembentukan BSB ini tidak serta merta langsung ada begitu saja, tetapi melalui proses sosialisasi, pengenalan terhadap masyarakat, pelibatan, dan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam penyebarannya. Adapun masyarakat yang terlibat langsung diajarkan bagaimana pencegahan tumbuhnya bibit penyakit serta penanganan beberapa penyakit seperti diare, penyakit menular, dan penyakit penyakit lain yang tumbuh bebas di tengah tengah masyarakat. Adapun pendidikan sejak dini tentang pentingnya kesehatan oleh BSB yang di adakan di rana sekolah formal, lingkungan pemerintah, lingkungan masyarakat serta pada perangkat Pemerintahan. Hal ini dilakukan sebagai sarana aspirasi pemerintah agar diketahui masalah yang dihadapi dan tindakan apa yang harus dilakukan.

Nilai-nilai positif dari nilai lokal yang menjadi bagian dari perumusan BSB ini dapat ditemui dalam proses kerjanya di lapangan. Nilai nilai lokal tersebut secara tersirat menjadi sebuah Standar Operasional (SOP) Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam aturan operasi BSB di lapangan. .

Dalam wawancara dengan narasumber yaitu, KH yang mana merupakan pemangku adat dari masyarakat adat Onto. Beliau mengatakan:

“Masyarakat dan tokoh masyarakat telah diundang oleh pemerintah untuk membicarakan nilai lokal Bantaeng dan ditanya hubungan nilai lokal yang harus memang selalu dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Undangan ini dibawa oleh aparat Bappeda kalau tidak salah, kemudian kami diundang sebagai perwakilan dan dianggap tahu mengenai nilai lokal yang ada di Bantaeng. Respon masyarakat menerima dengan baik karena program ini mengandung banyak nilai positif seperti tinggal menelpon tidak lagi dibawa ke Puskesmas yang peralatannya sangat sederhana. Berbeda dengan BSB mobile yang lengkap dengan alat perawat dan dokter. Percepatan program ini tidaklah mudah seperti apa yang kita lihat sekarang. Hal ini terjadi karena masyarakat belum mengetahui sebelum dipahami oleh perangkat Desa, Dusun, dan sebagainya. Persoalan jaringan dan HP yang masih sangat kurang dan persepsi masyarakat mengenai ambulans BSB yang gratis itu, mereka kira dibayar mahal sehingga masyarakat takut untuk menelepon, apalagi untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah padahal BSB mobile ini gratis dan dibiayai oleh Pemda Bantaeng dan mobil Ambulans BSB merupakan bantuan dari Jepang. Kasus di masyarakat adat Onto masih ada beberapa masyarakat adat yang menolak dan malah ada yang masih menggunakan obat tradisional sekalipun penyakit ini harus melalui tindakan medis oleh dokter, kemudian dengan kasus ini kepada Desa Camat Tokoh adat dan beberapa masyarakat yang paham kemudian menjelaskan tentang program ini yang mempunyai nilai lokal seperti *sipakatau* dan hal ini terus dilakukan sehingga antara program BSB ini dan nilai lokal itu berjalan beriringan karena di dalam program BSB terdapat nilai kemanusiaan, nilai kerjasama, dan nilai nilai yang lain. Sekalipun ada beberapa sebagian kecil masyarakat yang kental dengan adat yang masih belum menerima program ini (BSB) sehingga mengharuskan kepala adat atau orang berpengaruh harus lebih menjelaskan, karena saya selaku pemangku adat dan beberapa yang lain diundang dalam penyusunan program ini. Semua menerima dengan baik dan saya kira hanya orang-orang yang kurang paham betul sehingga belum menerima sepenuhnya program BSB ini.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, masyarakat dan tokoh masyarakat diundang oleh pihak BAPPEDA untuk membicarakan terkait nilai lokal yang dimasukkan ke dalam program inovasi BSB sebagai

nilai nilai yang harus dijaga dan dilestarikan. Respon masyarakat sangat menerima dengan baik terkait hadirnya program ini, walaupun progres dari program BSB memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk beradaptasi di masyarakat seperti saat sekarang ini. Program BSB mengandung banyak nilai positif di masyarakat, seperti pada saat dibutuhkan masyarakat hanya perlu menelepon di *call center* 119 tidak perlu lagi membawanya ke PUSKESMAS. Dimana keunggulan dari BSB itu sendiri memiliki peralatan yang lengkap dengan tersedianya perawat dan dokter yang selalu bersiaga jika ada yang membutuhkan jasa BSB, berbeda dengan PUSKESMAS dengan peralatan yang masih seadanya dan minimnya tenaga medis yang menangani pasien. Selain tokoh masyarakat, perangkat Desa, Dusun, dan yang lainnya yang lebih paham, memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum paham. Di tambah teknologi untuk menyebarkan informasi dan persepsi masyarakat bahwa hadirnya BSB mobile adalah sebuah layanan kesehatan dengan gratis retribusi yang naungi langsung oleh PEMDA Kabupaten Bantaeng dan juga mobil BSB itu adalah hasil dari bantuan Jepang kepada Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai investasi peningkatan pelayanan kesehatan. Terkhusus di Masyarakat adat Onto masih ada beberapa warga bertahan dengan metode obat tradisional sekalipun penyakit yang dialami membutuhkan perawatan medis. Adapun nilai lokal yang terkandung di dalam inovasi BSB itu sendiri contohnya ialah *sipakatau* atau memanusiakan manusia dalam proses beroperasinya. Adapun nilai nilai yang lain seperti nilai kerjasama antara tim yang bertugas dalam BSB

maupun antara masyarakat dengan program itu sendiri. Dan juga dalam proses perencanaan program inovasi BSB seluruh pihak masyarakat termasuk pemangku adat masyarakat adat Onto dalam hal ini KH menerima program BSB dengan baik dan hanya orang-orang yang belum paham yang tidak menerima program tersebut sepenuhnya.

Selain narasumber pemerintah dan tokoh masyarakat adat, peneliti juga mengumpulkan informasi dari masyarakat umum yang pernah merasakan manfaat dari program BSB. Selain itu, narasumber ini adalah ibu rumah tangga yang tinggal di pinggiran kota Kabupaten Bantaeng yang berinisial ZR. Narasumber ini mengungkapkan bahwa:

“Program BSB ini awalnya saya tidak kenal karena saya jarang keluar rumah dan bersosialisasi, saya sangat sibuk dengan urusan rumah tangga, apalagi saya punya 4 anak-anak kecil dan yang paling tua itu baru masuk SMP kelas 1. Saya baru mengetahui kalau program BSB ini ada ketika saya kecelakaan jatuh dari motor ketika sepulang dari pasar gara-gara menabrak anjing, tukang ojek dan kebetulan juga tidak ada rumah di daerah saya jatuh, hanya pinggiran sawah, saya tidak tahu mau berbuat apa karena tukang ojeknya juga tidak bisa berdiri dan tiba-tiba ada orang di dekat saya, menelepon dalam hati saya bertanya kenapa orang ini tidak menolong, kenapa cuma menelepon tolong-tolong datang di daerah ini dan panjang penjelasannya, tidak lama dia baru bertanya ibu kenapa? Saya tidak jawab karena pikiran campur aduk dan kaki saya sangat sakit, tidak sampai 5 menit mobil ambulance datang.

Ibu tersebut lebih lanjut mengungkapkan:

Pada saat itu dokternya tidak bertanya apa-apa langsung memegang dan menyuruh perawatnya untuk mengangkat saya naik ke mobil. Saat dokternya membersihkan luka saya, dokternya bertanya? Saya jawab leganan saya dok, tetapi yang paling sakit kaki saya. Setelah saya jawab mobilnya langsung jalan dalam hati saya bertanya, saya mungkin akan di bawa ke PUSKESMAS atau Rumah Sakit, setelah luka saya dijahit oleh dokter, mobil tiba-tiba berhenti, dan dibuka pintu. Dokternya

bertanya ini rumah ibu? sembari dia membantu saya berdiri. Dia membantu saya jalan masuk hingga sampai di rumah. Saya bertanya berapa biaya pengobatan yang harus saya bayar dok, dia bilang ini gratis ibu yang jelas administrasinya foto dan tandatangan berita acara sebagai laporan di Kantor. Program BSB ini sangat baik karena tidak melihat status ekonomi ataupun kasta dari pasien nanti setelah ditolong baru bertanya alamat dan sebagainya, kemudian merata juga pengobatan dan pertolongannya untuk menolong semua masyarakat mau miskin kaya pegawai ibu-ibu bapak-bapak dan semua elemen masyarakat pasti dia tolong, seperti waktu saya mau buka perban kaki ditelepon datang lagi mengecek perban kaki saya dan menggantinya dengan yang baru padahal cuman di telepon sudah datang, pokoknya program BSB ini sangat membantu dan saya sebagai masyarakat Bantaeng mengucapkan terimah kasih banyak kepada Gubernur Sulawesi Selatan pak Prof Nurdin, karena nanti pada periodenya baru ada program seperti ini sebelum sebelumnya itu sangat susah untuk berobat, karena harus ke rumah sakit atau puskesmas itupun kalau di puskesmas harus siang. Kalau bisa program ini harus dipertahankan dan kalau bisa Pustu atau Puskesmas di semua kampung yang ada di Bantaeng ini ada Dokter atau minimal perawat untuk memeriksa kesehatan semakin dekat dan memeriksa saat nanti kalau tidak bisa ditangani baru menelepon BSB agar kita masyarakat hemat biaya juga. Dan kalau bisa Prof Nurdin menerapkan di Sulawesi Selatan Supaya kesehatan merata seperti yang masyarakat Bantaeng rasakan seperti saat ini.”

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses terlaksananya program Brigade Siaga Bencana ini tidak berlangsung tersosialisasikan begitu saja menyeluruh kepada masyarakat, hal ini terjadi karena proses sosialisasi tidak langsung dari rumah ke rumah sehingga masih ada beberapa kalangan masyarakat yang belum mengetahui kehadiran program ini. Namun seiring berjalannya waktu proses sosialisasi tidak hanya melalui program program pencerahan ataupun dari pemerintah secara formal melainkan dari pelaksanaan program ini, masyarakat akan paham karena bicara dari mulut ke mulut warga serta keluarga ataupun tetangga yang

berada di sekitar pasien yang ditangani oleh pegawai Brigade Siaga Bencana, selain itu juga masyarakat sangat mengharapkan kehadiran program ini dapat terlaksana dan bertahan sekalipun Pemimpin Daerah terganti, selain itu masyarakat juga mengharapkan program ini berkembang seperti pengaktifan postu dan puskesmas baik desa ataupun kecamatan aktif dan ada petugas seperti Dokter ataupun perawat yang siaga 24 Jam agar akses kesehatan lebih mudah terjangkau.

Prosedur kerja BSB ini mencerminkan nilai-nilai lokal seperti nilai kejujuran ketika melakukan pekerjaan di lapangan dengan sesuai prosedur dan adanya bukti pelaporan tugas di lapangan, nilai kepatutan dengan menempatkan tim sesuai bidangnya seperti dokter ahli, perawat, bidan, dan sarana kendaraan kesehatan dengan alat yang memadai, nilai cendekia meliputi tidak hanya sebagai tim penanganan kesehatan, tetapi juga memberikan edukasi tentang pencegahan dan penanganan terkait suatu penyakit kepada masyarakat, dan nilai keteguhan meliputi hadirnya aturan dan prosedur kerja yang dimana menjadi acuan dan proses mulai dari masyarakat membutuhkan jasa dari program BSB ini hingga sampai pada beroperasinya di lapangan

D. Pembahasan

Pembahasan adalah isi dari hasil analisis data, hasil wawancara, kajian pustaka, dan fakta yang didapatkan di lapangan sesuai dengan teori yang digunakan yang mana dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Sangkala. Teori tersebut digunakan untuk mengetahui strategi inovasi pemerintah dalam perencanaan dan perumusan program inovasi. Di mana

dalam strategi tersebut terbagi atas layanan terintegrasi, desentralisasi, pemanfaatan kerja sama, pelibatan warga Negara, serta teknologi komunikasi dan informasi. Untuk mengetahui eksistensi nilai lokal di dalam inovasi program BSB, maka peneliti menggunakan teori yang yang menyangkut nilai lokal yang dikemukakan oleh Toriolo. Adapun nilai lokal yang dikemukakan oleh Toriolo adalah nilai kejujuran, nilai cendekia, nilai kepatutan, dan nilai keteguhan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang eksistensi nilai lokal dalam inovasi pemerintah daerah di Kabupaten Bantaeng, peneliti mengemukakan indikator strategi inovasi sebagai berikut.

1. Layanan Terintegrasi

Menurut Sangkala layanan terintegrasi merupakan layanan dimana sektor publik menawarkan peningkatan sejumlah layanan, warga memiliki harapan yang tidak sederhana dimana warga meminta layanan yang disediakan disertai dengan kenyamanan. Berdasarkan permintaan warga yang tidak sederhana dan secara tidak langsung, program inovasi layanan di sektor publik Brigade Siaga Bencana (BSB) hadir di Kabupaten Bantaeng.

Sebagaimana yang dikatakan Kasubag Inovasi dan Pengembangan di Bappeda, program BSB hadir sebagai inovasi di bidang layanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang dimana pada tahun 2008 angka derajat kesehatan masyarakat Bantaeng terbilang masih

sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh Angka Kematian Ibu (AKI), ,Angka Kematian Bayi (AKB) terbilang tinggi.

Lebih lanjut Kasubag Bappeda menjelaskan, faktor dari kemiskinan menyebabkan banyak hal seperti perempuan miskin yang rentan terkena penyakit, gizi buruk, kurangnya air bersih, ditambah hal yang paling krusial ialah akses menuju tempat pelayanan kesehatan sseperti Rumah Sakit, PUSKESMAS, ataupun PUSTU, terbilang lumayan jauh. Olehnya itu, pada tahun 2008 BSB hadir sebagai solusi pemerintah untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan sebagai mana harapan masyarakat yang tidak sederhana, serta layanan diberikan oleh BSB memiliki kenyamanan yang sama ditawarkan oleh tempat pelayanan kesahatan umum, seperti Rumah Sakit Umum (RSU).

Adapun layanan dalam program BSB ini sangat memadai sebagaimana yang tertuang UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bertajuk Inovasi Daerah dimana peiningkatan kualitas pelayanan dan peralatan yang ada harus mampu menunjang kebutuhan masyarakat atas kualitas pelayanan yang memadai . Program ini ditunjang oleh ketersediaan alat yang lengkap dan tim medis yang selalu siaga layaknya di Rumah Sakit umum, jika sewaktu waktu ada masyarakat yang menghubungi di *call centre* 119 dan juga jika pasien sangat membutuhkan perawatan, tidak ada proses administrasi yang memakan waktu cukup lama untuk menindaklanjuti kondisi pasien yang membutuhkan perawatan secepat mungkin.

Jadi, layanan terintegrasi terkait program inovasi BSB jika melihat pelayanan publik yang diberikan program ini mewakili harapan masyarakat yang tidak sederhana dan kenyamanan yang diterima oleh masyarakat terpenuhi dalam proses pelaksanaannya.

2. Desentralisasi

Desentralisasi adalah pemberian dan monitoring layanan lebih dekat dengan masyarakat dan biasanya membentuk kepastian terhadap tingkat permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat atau pelaku bisnis yang ada.

Berdasarkan Buku “*Napak Tilas The New Bantaeng dalam Bingkai Brigade Siaga Bencana (BSB)*” sebagai referensi peneliti dan temuan peneliti yang ada di lapangan, kehadiran BSB sebagai strategi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan serta permintaan layanan kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi sekalipun itu di daerah terpencil, pemerintah menempatkan 5 posko utama Brigade Siaga Bencana yang tersebar di 5 wilayah di Kabupaten Bantaeng. Adapun 5 wilayah tersebut ialah di Kecamatan Bissappu untuk menangani wilayah Bantaeng Barat hingga di perbatasan Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Ulu Ere menangani di wilayah Bantaeng Utara hingga berbatasan pada wilayah pegunungan Kabupaten Jeneponto, di wilayah Kecamatan Bantaeng atau pusat Kota Kabupaten Bantaeng, menangani wilayah perkotaan hingga pinggiran Kota Bantaeng, di Kecamatan Pa’jukukang menangani wilayah Bantaeng Timur hingga di perbatasan Kabupaten

Bulukumba, dan di Kecamatan Tompo Bulu menangani wilayah bagian pegunungan Bantaeng hingga di wilayah yang berbatasan dengan pegunungan Kabupaten Bulukumba.

Program BSB ini tidak hanya memenuhi permintaan masyarakat Bantaeng saja, melainkan juga dirasakan manfaatnya bagi masyarakat kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantaeng, seperti di Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto dan di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bertajuk Inovasi Daerah efisiensi dan efektifitas pelayanan bersesuaian dengan monitoring langsung yang dilakukan oleh pemerintah terkait pemenuhan permintaan masyarakat Bantaeng dengan hadirnya 5 posko utama Brigade Siaga Bencana yang ada untuk membentuk kepastian terkait permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat Kabupaten Bantaeng. Tidak hanya itu, kepuasan yang diterima masyarakat yang tinggal di perbatasan Kabupaten Bantaeng juga merasakan manfaat di bidang kesehatan dari program BSB ini.

3. Pemanfaatan Kerjasama

Bermakna sebagai Pemerintahan yang inovatif untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih efisien dalam pemberian layanan publik, lebih kolaboratif antar organisasi dan juga terjadi kerjasama antar publik dan swasta.

Brigade Siaga Bencana dalam perencanaan dan perumusannya, Kasubag Inovasi dan Pengembangan Bappeda menjelaskan Bupati Bantaeng bekerja sama dengan beberapa instansi Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Dinas yang berkordinasi dan bergerak di bidang pendidikan seperti sekolah melalui program penanganan sejak dini dan pelestarian nilai lokal sebagai bagian perumusan dari program BSB, Dinas Badan Pembangunan Daerah sebagai perencanaan dan pengembangan inovasi BSB menjadi inovasi yang telah diterapkan di Kabupaten Bantaeng dan masih berlangsung hingga sampai saat ini, dan Dinas Kesehatan sebagai kordinasi pelaksana dan aktor dari program BSB.

Tidak hanya itu dokter yang bertugas pada program BSB menjelaskan, aparat yang berwenang juga terlibat mengambil peran dalam berjalannya program inovasi BSB ini sebagai pengamanan perjalanan ketika BSB sedang beroperasi di jalan. Bantuan langsung dari kerjasama pengusaha Jepang dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Bantaeng diberikan berupa mobil yang digunakan BSB untuk beroperasi.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bertajuk Inovasi Daerah dilaksanakan secara terbuka dapat dilihat dari pemanfaatan kerjasama sebagai pemerintah yang kolaboratif, pemerintah Kabupaten Bantaeng memenuhi peningkatan layanan publik dengan melibatkan seluruh elemen yang ada di Kabupaten Bantaeng

seperti Bupati, Pemerintah Daerah, dan aparat yang berwenang untuk memenuhi peningkatan layanan publik agar lebih efisien dalam memberika pelayanan kepada masyarakat.

4. Pelibatan Warga Negara

Kewenangan pemerintah yang inovatif harus merealisasikan peran-peran pentingnya dengan mendorong peran-peran warga Bantaeng untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kabag Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kasubag Inovasi dan Pengembangan Bappeda, dan Pemangku masyarakat adat Onto yang sempat peneliti wawancarai, tidak hanya *stake holder* dan investasi asing yang terlibat dalam perencanaan program BSB, tetapi tokoh masyarakat maupun pemangku masyarakat adat ikut berperan dalam prosesnya. Respon masyarakat sangat menerima dengan baik terkait hadirnya program ini, walaupun progres dari program BSB memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk beradaptasi di masyarakat seperti saat sekarang ini.

Program BSB mengandung banyak nilai positif di masyarakat, seperti pada saat dibutuhkanya masyarakat hanya perlu menelepon di *call center* 119 tidak perlu lagi membawanya ke PUSKESMAS. Dimana keunggulan dari BSB itu sendiri memiliki peralatan yang lengkap dengan tersedianya perawat dan dokter yang selalu bersiaga jika ada yang membutuhkan jasa BSB, berbeda dengan PUSKESMAS dengan peralatan yang masih seadanya dan minimnya tenaga medis yang menangani

pasien. Selain tokoh masyarakat, perangkat Desa, Dusun, dan yang lainnya yang lebih paham, memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum paham.

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bertajuk Inovasi Daerah menjelaskan tentang perbaikan efektivitas dan dilakukan secara terbuka (umum) jika di lihat pada program BSB ini sudah sangat memenuhi. BSB adalah sebuah program yang menjadi kewenangan pemerintah yang inovatif dengan melibatkan peran penting tokoh masyarakat maupun pemangku masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam sosialisasi ataupun pemberian pemahaman kepada masyarakat awam terkait program inovasi ini untuk mendorong ke arah perubahan yang lebih baik.

5. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi

Untuk memudahkan akses informasi yang dibutuhkan melalui komunikasi yang memanfaatkan teknologi sehingga penyebaran informasi mampu melingkupi secara menyeluruh.

Pada proses pengenalan program BSB, masyarakat diberikan berupa buku yang berjudul “Napak Tilas *The New Bantaeng* dalam Bingkai Brigade Siaga Bencana (BSB)” oleh instansi Bappeda sebagai bahan bacaan untuk mensosialisasikan program BSB ini kepada masyarakat.

Demikian pula untuk menjamin kelangsungan pelayanan dibentuk jaringan informasi dan komunikasi antara PUSKESMAS dan jejaringnya

dengan pihak BSB sehingga dapat terbentuk sistem pelayanan untuk mendapatkan informasi tentang program pemerintah, maka dilakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang program BSB dan cara menghubungi BSB *call center* di 119.

Demikian pula untuk menjamin kelangsungan pelayanan dibentuk jaringan informasi dan komunikasi antara PUSKESMAS dan jejaringnya dengan pihak BSB berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bertajuk Inovasi Daerah.

Sebagaimana yang dikatakan oleh dokter yang merupakan tim BSB, layanan Brigade Siaga Bencana memanfaatkan layanan komunikasi berupa *call center* di nomor 119 yang beroperasi selama 24 jam, jika ada masyarakat membutuhkan layanan kesehatan ini. Petugas akan melakukan tanggap informasi dengan cara menanyakan secara detail tentang lokasi pasien, keluhan pasien, dan kondisi pasien saat ini. Petugas kemudian merujuk tim BSB terdekat sesuai zonasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasien. *Response time* sekitar 5 menit untuk wilayah perkotaan, dan hanya sekitar 15 menit untuk wilayah yang terbilang jauh.

Teknologi komunikasi dan informasi menjadi hal yang penting dalam program BSB ini, karena tim BSB yang akan beroperasi harus mengetahui informasi tentang keluhan pasien, kondisi pasien, lokasi pasien untuk mempersiapkan semua keperluan yang dibutuhkan dalam perawatan yang dilakukan kepada pasien.

Dari hasil pembahasan terkait indikator strategi inovasi yang dikemukakan oleh Sangkala dalam program inovasi Brigade Siaga Bencana (BSB), peneliti dapat menyimpulkan bahwa program inovasi ini mampu memenuhi standar kebutuhan masyarakat yang tidak sederhana dimana pelayanan yang maksimal disertai dengan kenyamanan, mampu memonitoring langsung terkait pemenuhan permintaan masyarakat dengan hadirnya 4 posko utama Brigade Siaga Bencana untuk membentuk kepastian terkait permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat, sebagai pemerintah yang kolaboratif, pemerintah Kabupaten melibatkan beberapa pemangku kepentingan dan bantuan asing untuk memenuhi permintaan yang tinggi sehingga tercapai kepuasan masyarakat, melibatkan masyarakat untuk mendorong perubahan, dan teknologi komunikasi yang dimanfaatkan oleh BSB ini menjadi hal utama dalam mendapatkan informasi ketika tim BSB sedang bertugas.

Program inovasi Brigade Siaga Bencana tidak terlepas dari nilai nilai lokal yang terkandung di dalamnya sebagai bagian dari identitas diri suatu daerah dalam melaksanakan program pemerintah. Adapun nilai-nilai lokal yang dimaksudkan dalam penelitian ini seperti yang dikemukakan oleh Toriolo adalah sebagai berikut.

1. Nilai Kejujuran

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Toriolo, nilai kejujuran ialah nilai utama dalam bersikap, dimana nilai kejujuran ini melekat sebagai bagian dari harga diri (*siri*) masyarakat Sulawesi Selatan.

Kabag Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan, nilai kejujuran dalam proses perumusan program BSB menjadi hal utama, karena program ini bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Di mana konsep pelayanan kesehatan tentang saling tolong menolong (*sipakatau*) manusia, memberikan kemudahan, dan akses untuk menikmati pelayanan kesehatan yang sama walaupun berada di daerah yang terpencil. Dengan hadirnya program ini, sebagai bentuk dari bagian harga diri (*siri*) pemerintah dalam memberikan pelayanan dan kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan.

Nilai kejujuran yang menjadi hal yang penting dalam proses pelaksanaan program BSB ini di lapangan dan lebih menguatkan pada pelibatan warga Negara dan pemanfaatan kerjasama. Dimana pada kerjasama antara dinas dan instansi pemerintah serta pemberian kendaraan BBSB oleh investasi asing, dan juga keterlibatan masyarakat dalam perumusan BSB ini, dibutuhkan kejujuran sehingga tercipta komitmen dalam peningkatan pelayanan di bidang kesehatan Kabupaten Bantaeng. Program ini dalam pelaksanaannya di lapangan ini harus melaporkan kepada markas utama sebagai laporan telah melakukan tugas dan tindakan perawatan ataupun penanganannya kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Masyarakat dalam penanganannya harus jujur pula jika tidak, bisa saja terjadi kesalahan tindakan yang akan dilakukan oleh tim BSB kepada pasien.

Penanganan yang cepat dan tepat dapat diberikan oleh tim BSB kepada masyarakat jika segala informasi yang diterima disampaikan sejujur-jujurnya, sehingga pelayanan lebih terintegrasi dan kenyamanan yang diinginkan masyarakat terpenuhi

2. Nilai Cendekia

Perbuatan yang benar oleh masyarakat maupun pemerintah dalam menghadapi kesulitan, memikirkannya kembali dan berhati-hati melaksanakan segala sesuatu.

Ketika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan perawatan kesehatan, seseorang dapat melakukan tindakan yang tepat dengan menghubungi pihak BSB di *call center* 119, agar penanganan terkait kesehatan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh tim BSB. Tokoh masyarakat ataupun tokoh agama juga ikut andil dalam memberikan sosialisasi tentang kebenaran adanya sarana program BSB ini kepada masyarakat awam terkait informasi itu.

Dinas Kesehatan sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam program BSB ini menempatkan tenaga kesehatan terampil dan yang lebih berpengalaman untuk melakukan tugasnya sebagai pelaksana program BSB. Dokter yang bertugas pada program BSB memaparkan, sarana *ambulance (mobile service)* keliling yang representatif didukung dengan pengemudi yang sudah berlisensi dan berpengalaman agar segala sesuatu dalam pengoperasian program ini, bisa terlaksana dengan sangat hati hati (aman). Tim BSB dituntut bekerja sepenuh hati agar dalam pemberian

pelayanannya mampu semaksimal mungkin agar masyarakat yang membutuhkan perawatan dapat disertai kenyamanan.

Menurut masyarakat yang pernah merasakan manfaat BSB yang sempat peneliti wawancarai, masyarakat melakukan tindakan yang tepat dengan menghubungi BSB ketika masyarakat yang lainnya sesegera mungkin membutuhkan penanganan medis. Pemerintah juga menempatkan orang yang tepat di bidangnya agar segala sesuatu dalam pelaksanaan program BSB ini tidak terjadi kesalahan dan selalu bertindak dengan hati-hati.

Sebagaimana dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan, yaitu upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan nilai lokal. Nilai cendekia lebih dapat di lihat pada strategi pelibatan warga Negara dan kerja sama antar instansi dalam Program BSB.

3. Nilai Kepatutan

Bagaimana kelayakan pemerintah atau suatu program inovasi itu mampu menjaga kelayakannya dan diterima oleh masyarakat.

Kasubag Inovasi dan Penembangan Bappeda menjelaskan, program BSB adalah program yang sangat layak untuk dijalankan di bidang inovasi pelayanan kesehatan, sebab dengan adanya program ini, masyarakat yang kurang mampu bisa menikmati pelayanan yang sama dengan masyarakat yang mampu karena program BSB ini tergolong gratis atau bebas retribusi. Dengan hadirnya program ini, pemerintah

mampu menurunkan angka kematian anak hingga 2/3 dalam kurun waktu 1990-2015, meningkatkan kesehatan ibu dalam rana masyarakat tidak mampu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit yang menular lainnya.

Kabag Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memaparkan, sarana pelayanan mobile yang mencakup seluruh wilayah yang ada di Bantaeng, menyiapkan sarana pelayanan kesehatan di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten untuk mengantisipasi kondisi yang mengharuskan rujukan langsung ataupun rujukan tidak langsung.

Lebih lanjut beliau memaparkan, program BSB ini memberikan pula pelatihan kepada masyarakat melalui *Medical First Responder* (MRF) dalam meningkatkan respon awal penanganan kasus pasien gawat darurat.

Program BSB sudah bisa dikategorikan layak dengan peningkatan layanan kesehatan yang dimaksimalkan pada layanan terintegrasi dan kerja sama sebagaimana dengan adanya sarana pelayanan mobile, sarana pelayanan kesehatan di tiap tingkatan desa, kecamatan hingga kabupaten, dan edukasi kepada masyarakat tentang penanganan awal pasien yang gawat darurat. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bertajuk Inovasi Daerah yang menjelaskan tentang mempertahankan nilai kepatutan dan Undang Undang No. 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan dimana pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat sebagai pelaksana dalam pemajuan dan mempertahankan kebudayaan.

4. Nilai Keteguhan

Bagaimana masyarakat atau pemerintah tidak mengingkari janji atau membatalkan kesepakatan dan juga mengerjakan sesuatu tidak berhenti hingga selesai.

Dokter yang bertugas pada tim BSB menjelaskan, penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional (SOP), dan Standar Pelayanan Publik (SPP) bertujuan untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat sesuai zonasi yang telah ditentukan mengacu kepada respon *time* yang telah dibuat salah satunya dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.

Kasubag Kebudayaan menjelaskan pula terkait pemberian pelatihan-pelatihan khusus kepada tim medis BSB seperti dokter, bidan, dan perawat diberikan untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam menangani kasus pasien gawat darurat. Tak hanya itu, masyarakat umum juga diberikan pelatihan untuk penanganan awal terkait kasus pasien kecelakaan lalu lintas.

Demikian pula untuk menjamin kelangsungan pelayanan dibentuk jaringan informasi dan komunikasi antara PUSKESMAS dan jejaringnya dengan pihak BSB sehingga dapat terbentuk sistem pelayanan yang berkelanjutan sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bertajuk Inovasi Daerah yang menjelaskan tentang meningkatkan efisiensi dan berorientasi kepada kepentingan umum, serta Undang Undang No. 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan tentang nilai

keteguhan dimana menjadi sebuah kelayakan dalam tidak mengingkari komitmen yang telah dibuat.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng betul-betul memperhatikan kinerja program tersebut dilapangan. Dengan menghadirkan SOP yang jelas, pelatihan khusus terkait tim medis, dan pelatihan penanganan gawat darurat kepada masyarakat ditambah hadirnya pula jaringan informasi *bottom up* dan *top down* pada sektor pelayanan kesehatan sehingga dapat terbentuk sistem pelayanan yang berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang eksistensi nilai lokal dalam inovasi pemerintah daerah di Kabupaten Bantaeng, peneliti menjabarkannya sebagai berikut.

1. Gambaran inovasi pemerintah daerah dalam program inovasi Brigade Siaga Bencana di Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada: (1) layanan terintegrasi di mana tersedianya layanan kesehatan yang memadai tidak hanya dirasakan pada masyarakat perkotaan saja tapi bahkan untuk masyarakat yang tinggal di pinggiran Kota dan pelosok Desa di Kabupaten Bantaeng, (2) Desentralisasi, pelayanan yang maksimal disertai dengan kenyamanan, di mana pemerintah Kabupaten Bantaeng memonitoring langsung terkait pemenuhan permintaan masyarakat dengan hadirnya 5 posko utama Brigade Siaga Bencana untuk membentuk kepastian terkait permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat, (3) Pemanfaatan kerjasama, sebagai pemerintah yang kolaboratif, pemerintah Kabupaten melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan serta bantuan asing untuk memenuhi permintaan yang tinggi sehingga tercapai kepuasan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, (4) Pelibatan Warga Negara, program BSB adalah sebuah program yang menjadi kewenangan

pemerintah yang inovatif dengan melibatkan peran penting tokoh masyarakat maupun pemangku masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam sosialisasi ataupun pemberian pemahaman kepada masyarakat awam terkait program inovasi ini untuk mendorong ke arah perubahan yang lebih baik, (5) Teknologi komunikasi dan informasi menjadi hal yang penting dalam program BSB ini, karena tim BSB yang akan beroperasi harus mengetahui informasi tentang keluhan pasien, kondisi pasien, lokasi pasien untuk mempersiapkan semua keperluan yang dibutuhkan dalam perawatan yang dilakukan kepada pasien semua hanya dengan melalui *call center* 119.

2. Eksistensi nilai-nilai lokal pada inovasi pemerintah daerah dalam program inovasi Brigade Siaga Bencana di Kabupaten Bantaeng terlaksana berdasarkan nilai yang ditemukan, yaitu: (1) Nilai Kejujuran, ketika melakukan pekerjaan di lapangan dengan sesuai prosedur dan adanya bukti pelaporan tugas di lapangan sesuai dengan layanan terintegrasi dan pelibatan warga Negara, (2) Nilai Kepatutan dengan menempatkan tim sesuai bidangnya seperti dokter ahli, perawat, bidan, dan sarana kendaraan kesehatan dengan alat yang memadai terlihat pada kerja sama antar instansi dan layanan yang terintegrasi, (3) Nilai Cendekia meliputi pekerjaan yang dilakukan pada saat beroperasi tim BSB harus dilakukan dengan sangat hati-hati dengan melibatkan tim yang betul-betul ahli di bidangnya agar tercipta layanan yang terintegrasi (4) Nilai Keteguhan meliputi hadirnya aturan

dan prosedur kerja dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dimana menjadi acuan dan proses mulai dari masyarakat membutuhkan jasa dari program BSB ini hingga sampai pada beroperasinya di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan uraian rekomendasi saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan juga instansi terkait dalam inovasi program Brigade Siaga Bencana (BSB) perlu mempertahankan dan menguatkan unsur nilai-nilai lokal yang sudah menjadi standar perumusan program BSB. Jangan biarkan nilai-nilai lokal tersebut tergerus hingga menjadikan suatu daerah kehilangan identitas daerahnya.
2. Diharapkan pemerintah Kabupaten Bantaeng dan instansi yang terkait dalam program BSB ini, meningkatkan koordinasi yang lebih baik lagi dengan layanan kesehatan di tingkat Desa, Kecamatan, hingga di Kabupaten untuk memperoleh layanan yang lebih maksimal dan juga memberikan sosialisasi terkait hadirnya program inovasi BSB tersebut agar masyarakat awam lebih paham dan memanfaatkan pelayanan tersebut guna terjadi peningkatan perubahan ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alus, C. 2014. “*Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahudi Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat*”. Jurnal “Acta Diurna” Vo. III No. 4.
- Al Gazali, A. 2017. “Skripsi Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kabupaten Bantaeng”.
- Alting, Husen. 2012. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Ardiyanto. 2016. Jurnal “Analisis Hubungan Budaya Lokal Dalam Pelayanan Pemerintahan Di Kabupaten Tana Toraja”.
- Darwis, R. dan Dilo, A. U. 2012. “*Implikasi Falsafah Siri’ Na Pacce pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaten Gowa*”. Jurnal el Harakah Vol. 14 No. 12
- Hayati, S.dkk. 2012. “Model Penanaman Nilai-Nilai Kearifan Lokal pada Masyarakat Sunda dalam Membentuk Perilaku Lingkungan Bertanggung Jawab”. Hasil Penelitian,Bandung: UPI Bandung.
- Hendar, J. H. 2012. “Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Kepemimpinan Sunda. Prosiding Konvensi Nasional Pendidikan IPS”. (Konaspipsi) ke 1. FPIPS-UPI Bandung.
- Idris, M. 2015 “*Bureaucracy Ethics Based in Public Service Local Wisdom in Gowa*. Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol. 6 No. 6 S4 Desember
- Ismadi, H. D. 2014. “*Ketahanan Budaya Pemikiran dan Wacana*”. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan dan Insignia.
- Marom, Afarul. 2015. Jurnal “Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik Bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Kudus”. ISSN 2460-9714 Vol. 1, No. 1, Oktober.
- Nurhaq, M. 2016. Skripsi “Analisis Inovasi Layanan Bebas Retribusi di Kabupaten Bantaeng”.
- PERDA Kabupaten Bantaeng No. 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng
- Pemerintah Kabupaten Bantaeng: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2017. “*Napak Tilas The New Bantaeng dalam Bingkai Brigade Siaga Bencana (BSB)*. Bantaeng: PEMDA Bantaeng
- Putra, H. S. A. 2014. “Jurnal Demokrasi To-Manurung Falsafah Politik Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan”. Vol. 40 (1) Juni

- Rahmawati, T., Noor, I., Wanusmawatie, I. 2014 “Jurnal Sinergitas Stakeholder dalam Inovasi Daerah”. JAP Vol. 2, No. 4.
- Ruslan, I. 2015. Jurnal “*Penguatan Ketahanan Budaya dalam Menghadapi Derasnya Budaya Asing*”. Jurnal TAPIs Vol. 11 No. 1 Januari.
- Saebani, Beni Ahmad. 2012. Pengantar Antropologi. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Salahuddin, Amruddin, Z., Azizah, E. C. 2017. “*Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Studi Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang*”. di akses pada 20 Juni 2018
- Sugiswati, Besse. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia. Jurnal Perspektif Vol. XVII No. 1 Tahun 2012 Januari.
- Sugiyono. 2016. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”. Bandung: Alfabeta
- Tahir, M. M dan Harakan A. 2015. “*Inovasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Smart Card di Kota Makassar*”. Jurnal Conference: Prosiding Seminar Nasional Call For Paper "Refleksi Pencapaian Reformasi Birokrasi di Indonesia", At Bandung, Volume: 1 di akses pada 18 Juni 2018.
- Tahir, M. M. dan Harakan, A. 2017 “*Inovasi Program Kesehatan 24 Jam Dalam Mewujudkan Good Health Care Governance di Kabupaten Bantaeng*” Jurnal Vol. 2, No. 1, Desember.
- Tahir, N. dan Tahir, M. M. 2017 “*Dampak Proses Transformasi Nilai Budaya Siri’ Na Pacce dalam Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kptsp) Kabupaten Takalar*”. Jurnal Analisis Sosial Politik. Volume 1, No 2.
- Unayah, N. dan Sabarisman, M. 2016. “*Identifikasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*” Jurnal Sosio Informa Vol. 2, No. 1 Januari-April. di akses pada tanggal 19 Juni 2018
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2017, Tentang Pemajuan Kebudayaan
- UU No. 23 Tahun 2014 dari Pasal 386 hingga pasal 390 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Bertajuk Inovasi Daerah.
- Widiyanti, T. 2015. “*Penerapan Nilai Nilai Kearifan Lokal dalam Budaya Masyarakat Kampung Adat Cireundeu Sebagai Sumber Pembelajaran IPS*”. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 24, No. 2 Edisi Desember
- Zuhriyati , Erni dkk. 2012. Kepemimpinan Transformatif Dalam Inovasi Pemerintah di Pemerintahan Kota Yogyakarta di Era Herry Zudianto. Yogyakarta: JKSG.

RIWAYAT HIDUP



Ahmad Nitozi Mansur., Lahir pada tanggal 04 November 1995, di Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Penulis Merupakan Anak ke 1 dari pasangan Mansur Tjongkeng dan Hasnawati. Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SD Inpress Tappanjeng pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007.

Penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Bantaeng lalu pindah ke SMP 4 Binamu dan tamat pada tahun 2010. Setelah tamat di SLTP, penulis kemudian menduduki bangku SMA di SMK NEG.1 Bantaeng dan tamat pada tahun 2013 dan pada setahun berikutnya, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar di jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru. Pada tahun 2019 penulis menyelesaikan studi lalu mendapatkan gelar S.1 jurusan Ilmu Pemerintahan dengan judul “Eksistensi Nilai Lokal dalam Inovasi Pemerintahan Daerah Studi Kasus: Program Brigade Siaga Bencana (BSB) di Kabupaten Bantaeng”. Semoga dengan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat segala hal yang dipelajari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.